



Kesaksian 15
Tokoh Nasional
Dan Internasional
Tentang

Nurcholish Madjid



Arsip Studi
Nurcholish Madjid
2022



Yayasan Wakaf
PARAMADINA



Almaghfurlah
Kyai H. Prof. Dr. NURCHOLISH MADJID
(17 Maret 1939 - 29 Agustus 2005 M)

Kesaksian 15 Tokoh Nasional dan Internasional tentang Nurcholish Madjid

Penyunting:

Budhy Munawar-Rachman

Editor:

Mochamad Ziaul Haq

Desain Sampul/Tata Letak:

Paelani Setia

Penerbit:

Arsip Studi Nurcholish Madjid

Jl. Palem Puri I No. 199 Bintaro Sektor 9

Tangerang Selatan 15413

Website: nurcholishmadjidstudies.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
CN: SAHABAT YANG BERANGKAT DULUAN	1
Oleh: Ahmad Syafii Maarif	1
CAK NUR DI MATA SAYA	8
Oleh: A. Mustofa Bisri	8
NURCHOLISH DAN GADING YANG RETAK	12
Oleh: Goenawan Mohamad	12
SEKILAS CATATAN TENTANG CAK NUR	19
Oleh: Jacob Oetama	19
SYARIAT ISLAM DI NEGARA SEKULAR	24
Oleh: Djohan Effendi	24
CAK NUR SEORANG PEJUANG KEBEBASAN	47
Oleh: Dr. Chandra Setiawan	47
CAK NUR: BUKTI KEPEDULIAN ALLAH TERHADAP BANGSA INDONESIA	62
Oleh: Anand Krishna	62
CAK NUR YANG SAYA KENAL.	68
Oleh: Sri Urip	68
REVOLUSI NURCHOLISH MADJID	73
By R. William Liddle	73
CAK NUR: MAN OF IDEAS	78
Oleh: Mar'ie Muhammad	78

NURCHOLISH MADJID, INDONESIA’S NEW ORDER, AND THE RISE OF THE MUSLIM MIDDLE CLASS	83
By Martin van Bruinessen	83
NURCHOLISH MAJID	95
By Paul Wolfowitz	95
NURCHOLISH MADJID: AN INTELLECTUAL SUFI	98
By Ann Kull	98
FAITH AND KNOWLEDGE:	118
NURCHOLISH MADJID AS EDUCATOR AND PHILOSOPHER	118
By MB Hooker and Virginia Hooker	118
CAK NUR, MUSLIM “PUBLIC INTELLECTUAL” FOR THE 21ST CENTURY	134
By Abdullahi Ahmed An-Na`im	134

CN: SAHABAT YANG BERANGKAT DULUAN

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Tahun 1966 sewaktu tinggal di Kota Gede, Jogjakarta, saya dan istri Nurkhalifah sudah mengenal CN (Cak Nur) lewat media cetak. Gambarnya yang terpampang di majalah *Panji Masyarakat* sebagai Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang baru menggantikan Sulastomo, saya tatap dengan penuh kekaguman. Dalam hati berbisik, alangkah hebatnya tokoh ini jika diukur dengan posisi saya di HMI hanyalah sebagai ketua bagian pendidikan HMI cabang Surakarta sebelum pindah ke Jogja. Di Jogja saya hanya mencatatkan diri sebagai anggota biasa HMI. Tidak aktif lagi, di samping pertimbangan usia, juga karena ada tanggungan keluarga dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Dalam sejarah HMI belum pernah ada seorang ketua umum dipilih sampai dua periode, kecuali CN. Itu berarti bahwa posisinya dalam himpunan pada waktu itu sukar sekali digantikan tokoh lain. CN dengan segala keunggulan yang melekat pada dirinya sedang tampil ke panggung tanpa tandingan dalam tubuh HMI. Seakan-akan berlaku formula bahwa antara 1966—1971: HMI adalah CN, dan CN adalah HMI.

Pada tahun 1965/1966 Indonesia sedang berada pada fase transisi berbahaya dan sangat kritis. PKI baru saja berontak dengan G30S-nya yang menggoncangkan dunia itu. Partai Komunis ini telah berupaya keras dengan segala cara

agar musuh sipilnya yang terakhir dan terkuat, HMI, juga harus dibubarkan, menyusul Masyumi, PSI, GPII, dan Murba. Tetapi berkat kegigihan Sulastomo dan anggota PB (Pengurus Besar) yang lain serta pembelaan dari ormas Islam dan Angkatan Darat, HMI selamat, sekalipun harus berlindung di balik semboyan “Nasakom Jiwaku”, sesuatu yang sangat berat dirasakan ketika itu. Politik untuk *survival* yang dilakukan HMI punya segi positif dan negatif. Pada aspeknya yang positif, HMI tidak bubar, masih punya kesempatan untuk menghadapi ideologi kiri yang bernafsu sekali untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Segi negatifnya adalah bahwa bagi kekuatan anti-nasakom idealis-radikal menilai HMI sudah “jual diri”, demi kelangsungan hidup. Bagi saya sekarang, semuanya itu adalah pilihan-pilihan yang serba sulit, serba dilematis, tetapi harus diambil. Bukankah menjadi pemimpin itu harus berani mengambil risiko? Sulastomo sebagai ketua umum HMI telah mengambil risiko itu dengan segala konsekuensinya, termasuk misalnya mengajukan usul agar Kasman Singodimedjo yang diadili dalam sebuah pengadilan sandiwara di Magelang diperberat hukumannya.

Karena kegagalan pemberontakan PKI dan mulai redupnya cahaya kepemimpinan Bung Karno di akhir 1960-an, HMI adalah di antara kekuatan mahasiswa bersama yang lain untuk segera mengakhiri masa transisi yang banyak makan korban itu. CN sebagai penerus kepemimpinan Sulastomo harus bekerja ekstra keras agar HMI tetap berada di garda depan bangsa bersama gerakan mahasiswa lain yang kemudian mengkristal dalam format KAMI (Kesatuan Aksi

Mahasiswa Indonesia), di mana HMI adalah di antara kekuatan intinya. KAMI mau tidak mau akhirnya mesti berhadapan dengan para pendukung Bung Karno dan kekuatan *status quo* lainnya, termasuk di lingkungan mahasiswa sendiri yang memang sudah terbelah, seperti terbelahnya kekuatan partai dan tentara. Di mata PKI, HMI adalah batu sandung yang berpengaruh jika tidak dibubarkan. Berkali-kali Bung Karno didesaknya untuk menghabisi HMI, tetapi karena banyaknya masukan dan keberatan dari berbagai kekuatan agar Bung Karno tidak tergesa-gesa dalam masalah ini, HMI akhirnya bertahan. Dalam situasi yang serba liar ini, kepemimpinan CN yang sabar, sejuk, dan visioner, HMI sampai batas-batas yang jauh telah turut menyelamatkan bangsa ini dari gempuran kekuatan kiri yang sudah kalap. Amat disayangkan Bung Karno terkesan diskriminatif terhadap kekuatan-kekuatan politik. Yang anti nasakom, kontra revolusioner, yang pro revolusioner. Pandangan hitam putih ini ternyata telah melahirkan bencana terhadap kelangsungan kehidupan bangsa ini.

CN telah mulai berperan secara nasional sejak permulaan Orba (Orde Baru), sampai suatu saat dia mengkritik keras kecenderungan otoritarian penguasa baru ini, yang sebelumnya sama-sama didukung. Kekaguman CN kepada Hatta dan Agus Salim, telah mempengaruhi sikap-sikap politiknya sampai batas-batas yang jauh. Gagasan negara Islam untuk Indonesia sudah ditinggalkannya, karena memang ditegakkan di atas landasan yang rapuh. Bagi CN, keislaman dan keindonesiaan dapat dikawinkan melalui pendekatan

kultural, bukan pendekatan politik yang memecah masyarakat Indonesia secara ideologis. CN sampai akhir hayatnya tetap konsisten dalam memegang pendirian ini. Artikulasi pemikiran CN tentang keislaman dan keindonesiaan dapat ditelusuri dalam banyak tulisannya. Sebagian besar gagasannya telah diwariskannya kepada bangsa ini dengan ikhlas. Oleh sebab itulah saya pernah mengatakan bahwa CN lebih layak disebut sebagai cendekiawan Indonesia, sebab dia telah menjadi milik semua anak bangsa.

Jika pada tahun-tahun krisis di atas, saya tidak punya bayangan bahwa pada satu saat kami akan bersama-sama belajar di kampus Universitas Chicago. CN lebih duluan ke sana, saya baru menyusul akhir 1978. Karena saya datang dengan S2 dalam ilmu sejarah dari Universitas Ohio, saya lebih duluan rampung. Apalagi CN sempat terdaftar pada Departemen Ilmu Politik bersama M. Amien Rais. Ternyata bukan di sana habitat CN, lalu kemudian pindah ke Departemen Ilmu-Ilmu Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, satu departemen dengan saya. Di sinilah dunia keilmuan CN yang sebenarnya. Tidak ada rintangan yang berarti yang harus dihadapinya, sebab di sini sampai-sampai batas tertentu adalah kelanjutan belaka dari Pesantren Gontor dan IAIN, kampus-kampus lama CN, tetapi dengan kiyai baru yang hampir *all-round* dalam kajian keislaman: Fazlur Rahman. CN dan teman-teman lain memperdalam al-Qur'an dengan kiyai ini, tidak saja di kampus, tetapi kami pergi mengaji ke rumahnya, sekitar 45 mil dari Chicago. Hari-hari mengaji telah semakin menambah mesranya persahabatan antara kami.

Tidak saja antara saya dan CN, keluarga kami pun telah bergaul dengan rapat.

Lebih empat tahun di Chicago, kami telah saling mengenal kepribadian masing-masing. Satu hal yang saya “iri” dengan CN: sikapnya yang tenang menghadapi berbagai persoalan, sesuatu yang tidak selalu saya miliki. Memang CN pernah mengalami sedikit kegoncangan pada saat menghadapi saat peralihan bidang studinya, dari Ilmu Politik ke departemen yang baru. Saya bersama Bung Salim Said telah turut menguatkan hatinya agar tetap tegar. Akhirnya CN melaju sampai rampung pada 1984 dengan disertasi tentang pemikiran Ibn Taimiyah di bawah bimbingan Fazlur Rahman.

Saya kelahiran 1935, lebih tua empat tahun dari CN yang lahir pada 1939. Tetapi Allah punya ketentuannya sendiri. CN berangkat lebih dulu, pada saat bangsa ini masih sangat memerlukannya. Pada tanggal 29 Agustus 2005, sahabatku ini telah pergi menghadap Allah. Insya Allah *husnul khatimah*. Amin. Pada tanggal 25 Maret 2005 pukul 13:20:32 lima bulan sebelum wafat saya masih menerima balasan SMS dari CN. Bunyinya: “ Ya, terimakasih Mas Syafii, dan do’anya semoga saya bisa secepatnya pulih seperti sediakala.” Ini saya simpan dalam HP sebagai bentuk komunikasi elektronik tertulis yang sangat berharga dari CN. Sewaktu dirawat di RS Pondok Indah, saya dengan Pak Malik Fadjar juga menjenguk CN ke sana. Kondisinya saat itu cukup menjanjikan. Semua kita berharap agar CN masih akan bersama bangsa ini dalam waktu yang lama. Tetapi Langit berkehendak lain, kita pun harus pasrah. Maut adalah sebuah misteri yang pasti.

Memang sewaktu masih dirawat di Singapura, saya sekeluarga telah menjenguknya. Kami datang pada hari CN baru keluar dari ruang ICCU. Yang mengharukan kami adalah CN menulis pesan untuk saya dalam tulisan Arab Melayu, tetapi sulit saya baca. Semuanya telah menjadi kenangan manis yang tidak akan terulang lagi. “CN, sahabatmu ini mungkin tidak lama lagi akan menyusul, usia sudah semakin renta, kaki sudah sering terasa sakit dibawa berjalan. Dunia intelektual Indonesia mengalami sebuah kekosongan ditinggal CN!”

Demikianlah, di sebuah sore pada 29 Agustus 2005 di Bandara Internasional Minangkabau, sewaktu akan ke Jogja, saya menerima telepon dari Bung Abd. Rohim Ghazali (Maarif Institute) bahwa CN telah tiada. Saya seperti kehilangan keseimbangan karena terkejut. Istri saya yang saat itu berada di Padang cepat saya kontak untuk langsung mendo’akan CN. Pihak Garuda saya hubungi agar saya tidak langsung ke Jogja, tetapi mampir dulu ke Jakarta, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat ini di mana kami telah bergaul sekitar 25 tahun, di Chicago dan di Tanah Air di wilayah kegiatan kami masing-masing. Sore dan malam itu CN sudah disemayamkan dalam keranda di Aula Yayasan Paramadina. Saya datang bersama pengusaha H.M. Deddy Julianto. Bergantian para takziah mengunjungi CN, pembesar, orang penting, dan rakyat jelata. Seluruh keluarganya ada di sana. Atas nama keluarga, saya menyampaikan ucapan belasungkawa yang amat dalam kepada keluarga CN. Malam itu, Dr. Yudi Latif yang memandu acara, telah meminta saya

untuk turut menyampaikan satu dua kata di malam yang penuh haru itu. Malam itulah saya mengatakan bahwa CN lebih tepat disebut sebagai cendekiawan Indonesia, milik semua orang, sebagai tokoh yang membela dengan gigih prinsip inklusivisme dan egalitarianisme.

Akhirnya ada sebuah usul dari saya. Karena pemikiran CN menyentuh berbagai ranah keilmuan dan kemanusiaan dengan Islam sebagai *core*-nya, saya mengusulkan agar dibentuk tim ahli penerjemah untuk seluruh atau sebagian karya CN ke dalam berbagai bahasa, khususnya bahasa Inggris dan bahasa 'Arab. Melalui terjemahan ini, dunia akan tersentak bahwa di kawasan khatulistiwa, di Indonesia, telah lahir dan berkarya seorang pemikir besar: Prof. Dr. Nurcholish Madjid, wafat dalam usia 66 tahun.

*(Ditulis atas permintaan panitia biografi CN via
Ahmad Gaus dari Paramadina).*

Jogjakarta, 14 Mei 2006

CAK NUR DI MATA SAYA

Oleh: A. Mustofa Bisri

Saya pernah beberapa kali di tegur orang – di jalan, di kereta api, di warung—“Bapak Cak Nur ya?!” . Tentu saja saya mengatakan bukan. Aku heran, bagaimana ada orang sampai menyangka diriku Cak Nur, KH. DR. Nurcholish Madjid; namun terus terang, dalam hati aku merasa bangga disangka Cak Nur.

Ada pepatah Arab mengatakan *Tasma’u bil Mu’aidi khairun min an taraah*, Mendengar tentang Muaid lebih baik dari pada melihatnya. Pepatah ini untuk menyatakan kekecewaan orang setelah melihat sendiri tokoh yang didengarnya hebat dan ternyata tidak sehebat yang didengar. Kalau boleh saya menggunakan model pepatah itu untuk Cak Nur, saya akan mengatakan secara terbalik, *Taraa Cak Nur khairun min an tasma’a bihi*. Melihat sendiri Cak Nur lebih baik dari pada hanya mendengar tentangnya.

Saya sering mendengar –dan membaca-- tentang Cak Nur dari beberapa tokoh dan media massa. Sebagai tokoh nasional, bahkan internasional, cendekiawan dan pemikir yang disebut-sebut sebagai pembaharu, segala gerak-gerik dan ucapan Cak Nur hampir selalu menjadi berita.

Pendek kata yang saya dengar tentang Cak Nur – sebagaimana tentang Gus Dur--semuanya serba hebat. Pemikirannya begitu canggih sehingga nyaris sulit

membayangkannya sebagai manusia biasa yang bisa berbicara biasa-biasa saja. Pemikirannya mengenai hal-hal yang besar belaka; tentang Islam, tentang negara, tentang demokrasi, tentang kemanusiaan, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentang pergaulan dunia, dan sejenisnya. Lalu orang pun membayangkan Cak Nur adalah sejenis makhluk perkasa tak tersentuh yang tinggal di menara gading.

Memang sering orang membandingkan Cak Nur dengan rekan sederahnya, Gus Dur. Sama-sama dari Jombang, sama-sama NU; bedanya Cak Nur terkesan rapi, tidak tampak keNUannya, dan tak berpolitik praktis; sementara Gus Dur urakan, pernah menjadi ketua umum NU, dan menjadi ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa. Sama-sama nasionalis, sama-sama pemikir, sama-sama demokrat yang menghargai perbedaan, sama-sama *public figure* yang penampilan dan pernyataannya dinantikan dan diingat-ingat orang. Sikap dan pernyataan-pernyataan keduanya juga sama-sama sering kontroversial. Bedanya, Cak Nur tidak terlalu sering dan tidak terasa mengguncang, Gus Dur hampir selalu kontroversial dan hampir selalu bikin geger. Kalau mau ditambahkan, keduanya sama-sama pernah dicalonkan/mencalonkan sebagai presiden. Bedanya Cak Nur kemudian mengundurkan diri, Gus Dur ditolak KPU.

Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah berkenalan secara pribadi dan sering kali bertemu dan berbincang-bincang dengan Cak Nur di luar “forum”. Ternyata, di luar apa yang saya dengar dan dibayangkan orang, Cak Nur adalah sosok manusia yang benar-benar manusia,

yang mengerti manusia, dan memanusiakan manusia. Ini menunjukkan bahwa Cak Nur memang, bukan hanya faham, tapi menghayati contoh yang diberikan pemimpin agungnya, Nabi Muhammad SAW dan tampak sekali mencoba mengamalkannya dalam kehidupannya.

Cak Nur bukan tokoh yang hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Cak Nur menghargai orang lain dan menyimak dengan seksama bicaranya; siapa pun orang itu. Maka dia bisa secara jernih menimbang untuk kemudian memberikan tanggapan bilamana perlu secara *i'tidal*.

Dalam forum, seperti halnya Gus Dur dan intelektual lain, Cak Nur tampak seolah-olah sangat sadar akan penguasaannya terhadap materi yang dibicarakannya. Bahkan setiap orang yang mendengarkannya bisa dipastikan juga merasakan hal ini. Namun Cak Nur akan memperhatikan setiap pertanyaan atau tanggapan orang terhadap paparannya dengan perhatian dan penghargaan yang kentara sekali. Maka saya sempat heran, ada kelompok orang yang tidak sependapat dengan Cak Nur dan tidak mau bertemu untuk mendiskusikannya secara baik-baik, malah lebih suka mendengarkan bicara mereka sendiri. Boleh jadi mereka tidak sebenarnya mengenal Cak Nur atau justru mereka takut bayangan kehebatan Cak Nur dan belum apa-apa sudah kehilangan nyali.

Di luar forum, Anda akan menjumpai manusia seperti yang saya sebutkan di atas. Manusia yang rendah hati. Menjawab pertanyaan; mendengarkan keluhan dan memberi

saran bila diminta; mendengarkan *joke* dan tertawa bila memang lucu; dan menerima saran-kritik tanpa merasa direndahkan. Semua dengan sikap dasar: menghargai manusia sebagai manusia. Ini selaras dengan yang diisyaratkan Allah dalam kitab suciNya, *"Walaqad karramNaa banii Adama..."*

Walhasil; Cak Nur di mata saya, benar-benar merupakan 'manusia seutuhnya': seorang hamba dan sekaligus khalifah yang tidak hanya menyadari kekhalifahannya, tapi juga kehambaannya.

Hampir semua orang Indonesia merasa kehilangan dengan berpulangnya Cak Nur ke hadirat Ilahi, tapi saya kurang yakin apakah semuanya benar-benar menyadari seberapa besar kehilangan itu. Cak Nur dicintai orang banyak dan insya Allah ini merupakan pertanda Allah mencintainya; sehingga mengampuni kesalahan-kesalahannya, menghargai amal-amal baktinya, dan menempatkan di tempat yang layak di sisiNya. Dan semoga Allah memberi ganti kepada bangsa ini atas kehilangan besar dengan kepergian Cak Nur, *rahimahuLlah*. Amin.

NURCHOLISH DAN GADING YANG RETAK

Oleh: Goenawan Mohamad

Ada perbedaan antara seorang Amerika yang berjanji, *For God and Country* dan seorang Nurcholish Madjid. Terutama semenjak “11 September”, patriotisme Amerika Serikat adalah sebuah gambaran diri sebagai sebuah negeri yang istimewa, semacam Tanah Yang Dijanjikan – sumber dari yang disebut *American exceptionalism* – sebuah citra yang diperbesar berulang-kali dan dinyatakan baik dalam retorika maupun kebijakan. Lagu yang tak henti-hentinya dinyanyikan itu, *God Bless America*, terdengar di mana-mana dan anggaran pertahanan mencapai lebih dari tiga kali gabungan anggaran pertahanan Rusia dan Cina. Dua kekuatan sekaligus dibangun: Tuhan dan tentara.

Dalam arti tertentu, filsafat publik Nurcholish sebenarnya juga mengumandangkan *For God and Country*. Tapi padanya, Tuhan dan tanah air tak serta merta bertaut, tak dengan sendirinya paralel. Dalam pemikirannya tak ada anggapan Tuhan telah memilih Indonesia sebagai sebuah negeri yang diciptakan melebihi yang lain. Nurcholish memandang tanah airnya dengan harap-harap cemas. Honni Bhabha pernah berbicara tentang Dunia Ketiga dan kecenderungan di dalamnya “untuk mengidentifikasikan diri dengan kehilangan”; agaknya hal itu dapat dikatakan pula

tentang kecenderungan Nurcholish. Tapi di sinilah justru religiusitas pandangannya mengambil bentuk.

Unsur “harap” dalam pandangan itu datang dari rasa syukur. Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang nyata, tulis Nurcholish dalam *Indonesia Kita*, menunjukkannya sebagai “bangsa yang sukses”. Sementara itu, unsur “cemas” dalam pandangan itu membuatnya berhati-hati dan bersabar – dengan kata lain, sebuah sikap tawakal.

Pertautan antara syukur dan tawakal itulah membuat himpunan pemikiran Nurcholish tentang politik – dan jenis patriotismenya – membawa gema yang religius, dengan tradisi Islam. Rasa syukur menyebabkan ia menerima apa yang diberikan Tuhan dalam bentuk negeri tempat ia dilahirkan. Sikap tawakal menyebabkan ia sadar bahwa karunia itu juga sebuah beban, sebuah amanat, juga sebuah sikap menerima untuk menanggung dan berangkat dari yang buruk.

Dalam bagian akhir buku kecil *Indonesia Kita* – ditulis ketika ada usaha untuk mencalonkannya sebagai Presiden dalam pemilihan umum terakhir – ia mengemukakan satu penyelesaian persoalan *once for all*. Tapi ini bukanlah suaranya yang tipikal. Seingat saya, Nurcholish pada umumnya lebih cenderung untuk tidak berasumsi ada cara yang seratus persen manjur. Ketika seseorang bertanya kepadanya dari mana mulai memperbaiki keadaan Indonesia yang di mana-mana rusak dan ruwet itu, ia menjawab, ringkas, dengan senyum: “Ya, dari mana saja”.

Ada pragmatisme yang subtil dalam jawaban seperti itu. Mencari solusi tujuh-sekali-pukul menghendaki asumsi bahwa kita akan dapat membangun sebuah sistem dan prosedur yang sempurna dalam mengelola sebuah Republik. Padahal, bagaimana kita dapat mengetahui secara sempurna dan dengan itu merancang kerja yang tak terancam salah dan gawat? Dalam kemustahilan itu, yang paling baik adalah membangun sistem yang selalu dapat memperbaiki diri secara teratur dan damai – sebuah sistem yang bertolak dari yang ingin saya sebut sebagai ‘etika kedaifan’, sikap kepada dunia yang bertolak dari kondisi ‘tak-ada-gading-yang-tak-retak’ dalam subyek. Etika kedaifan ini juga yang diekspresikan dalam sikap tawakal.

Dari segi ini sebenarnya gagasan Nurcholish tentang sekularisasi lebih dapat dilihat dengan mendasar. Memang tak dapat dikatakan gagasan politik Nurcholish sudah bersentuhan dengan pengaruh yang membentuk pemikiran politik “pasca-metafisik” yang antara lain melahirkan pragmatisme ala Rorty atau bersentuhan dengan “pikiran daif” (*pensiero debole*) dari Vattimo. Dalam pemikiran Nurcholish, seperti dalam pemikiran Iqbal, masih kuat endapan optimisme yang agaknya berhubungan dengan semangat modernitas ala Pencerahan Eropa – di mana subyek manusia merupakan pelaku yang menentukan. Tapi pada akhirnya gagasan sekularisasi tetap sesuai dengan sebuah zaman yang menyaksikan sejarah manusia sebagai sejarah yang berkali-kali luput: sekularisasi meletakkan urusan dunia

– dengan konflik dan impian-impian -- dalam acuan yang ditafsirkan Nurcholish sebagai ‘Hari Dunia’.

Penggaris-bawahan “Hari Dunia” pada gilirannya mengandung kesadaran akan batas. Sebuah proyek duniawi yang dijalankan sebagai sesuatu yang sakral – misalnya Negara Islam – pada akhirnya terbukti tak dapat membebaskan diri dari kenyataan, bahwa ia proyek manusia di dalam “Hari Dunia” juga, yang mustahil mencapai sebuah kelengkapan yang kekal.

Dari sinilah saya lihat komitmen Nurcholish kepada demokrasi. Ada yang pernah mengatakan, demokrasi itu bukan hal mustahil karena manusia menurut kodratnya baik, tapi demokrasi perlu karena manusia itu menurut kodratnya tidak baik. Adagium ini menggugah hati, namun ada sesuatu yang problematis di sana -- pada kata-kata “kodrat”. Kata itu sekaligus dipakai untuk dua kualifikasi yang sama sekali bertentangan. Sebab itu agaknya lebih tepat dikatakan bahwa kita tak dapat berbicara dengan pasti tentang “kodrat” manusia. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kualifikasi apapun tentang manusia adalah hasil proses “penyimpulan” dan “perumusan”, sebuah bentukan diskursif.

Yang perlu juga ditambahkan ialah bahwa di sebuah masa ketika dunia pemikiran telah mencoba melepaskan diri dari yang disebut oleh Laclau sebagai *“illusion of immediacy”*, ada kesadaran bahwa *discourse* atau wacana bukanlah sekedar representasi, melainkan juga konstruksi yang tak akan pernah komplit. Dengan demikian tiap klaim akan Kenyataan

senantiasa dimediasi oleh sebuah posisi subjek; Kenyataan itu sendiri senantiasa luput. Maka di “Hari Dunia”, mustahil diperoleh kata akhir yang paling benar.

Demokrasi berangkat dari asumsi tidak adanya kata akhir itu. Itu sebabnya dalam proses demokratis termaktub keharusan *check and balance* dan perlunya senantiasa ada alternatif bagi tiap pemegang posisi hegemonik. Nurcholish Madjid sangat menyadari hal ini.

Tapi perlu rasanya saya tambahkan di sini, pandangan Nurcholish yang saya sebut tadi merupakan hasil kesimpulan yang saya tarik dari perspektif saya, bukan hasil diskusi saya dengan dia. Saya tak dapat menyatakan diri sebagai orang yang dekat dengan pemikir ini. Pertemuan antara kami termasuk jarang, dan walaupun terjadi, umumnya tak lebih ketimbang tiga jam. Seingat saya, hanya empat kali kami duduk dalam panel bersama, dua di antaranya diselenggarakan oleh Paramadina. Saya merasa bangga bahwa dalam kesempatan itu, kami tak pernah berselisih pendapat, meskipun dari dasar yang berbeda: Nurcholish mempunyai kepiawaian yang saya tak punya dalam menimba khazanah pemikiran Islam dalam sejarah.

Bagi saya yang paling mengesankan ialah keberanian dan kemandirian waktu ia mendukung secara terbuka KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di tahun 1996. Waktu itu usaha seperti KIPP dengan mudah dianggap sebagai kegiatan “subversif”, sebab pada dasarnya ia menggugat, atau mempertanyakan, legitimasi pemilihan

umum yang diselenggarakan oleh rezim 'Orde Baru'. Dalam suasana politik yang represif, langkah seperti KIPP memerlukan kenekatan tersendiri. Idenya datang dari sejumlah pemuda yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi, yang kemudian, terutama yang dari PRD, dikejar-kejar, dipenjarakan, diculik, bahkan ada yang dibunuh.

Saya menerima permintaan mereka untuk memimpin Komite itu – dengan rasa kagum saya kepada mereka ini – karena saya melihat perlunya perlawanan yang lebih terbuka, tapi juga lebih terorganisir dan terkoordinasi terhadap rezim Soeharto. Saya tahu KIPP akan dihambat, malah mungkin akan dibekuk. Saya juga sadar, dengan tenaga yang terbatas, kami tak akan banyak menghasilkan sesuatu pemantauan pemilihan umum yang berarti. Tapi tujuan utama KIPP adalah mulai menunjukkan bahwa cara 'Orde Baru' melanjutkan kekuasaan tak bisa dibiarkan terus menerus sangat curang dan brutal. Dengan itu pula ditunjukkan bahwa perlu ada sebuah pemilihan umum – cara melembagakan kekuatan rakyat untuk meninjau kembali kekuasaan yang di atas – yang dilakukan secara bebas dan adil.

Waktu itu saya sudah berada di bagian yang agak "gelap" dalam arena politik Indonesia, dan Nurcholish Madjid sebenarnya masih berada dalam sisi yang "terang": ia belum dianggap sebagai musuh oleh rezim yang berkuasa. Tapi ia tak ragu-ragu untuk bergabung dengan KIPP dan mendukungnya dengan argumen yang jelas: Indonesia yang belum mendapatkan demokrasiya perlu tetap percaya, bahwa pemilihan umum adalah metode demokrasi untuk selalu

dapat memperbaiki Indonesia secara teratur dan damai. Jika pemilihan umum terus menerus berjalan curang, pada akhirnya hanya ada satu cara untuk perubahan: dengan kekerasan.

Tak banyak orang seperti Cak Nur waktu itu: seorang yang berani mengambil sikap dengan berpikir mendalam, tenang dan arif. Saya tahu, seperti dia tahu, tak ada gading yang tak retak, juga pada dirinya, tapi dalam diri Nurcholish, gading itu tetap bernilai tinggi.

—

SEKILAS CATATAN TENTANG CAK NUR

Oleh: Jacob Oetama

Karena rasa tanggungjawab dan desakan banyak pihak, Cak Nur akhirnya bersedia dipanggungkan sebagai calon presiden melalui partai Golkar, Teman dan sahabatnya termasuk saya bereaksi dengan bertanya : Tepatkah kesediaan itu ? Keraguan itu disebabkan oleh pemahaman perihal politik (praktis) dan sosok pribadi Cak Nur. Sanggupkan tokoh cendekiawan Muslim itu menjalani jalur pembawaan dan liku-liku politik ?

Benar keraguan itu. Begitu dihadapkan pada indikasi perpolitikan yang “kotor” ia segera mengundurkan diri. Bukan saja pemikiran, sikap dan dan perilakunya yang lurus dan jujur, segera dihadapkan dengan kenyataan “real politik”. Sekaligus juga sosok wataknya yang “halus”. Agak sulit berkompromi dengan kerasnya tabiat politik. Tabiat politik dari sananya keras,. Kekerasan, ketegelan itu melekat pada kekuasaan politik, seakan terlepas dari berlakunya sistem yang berbeda.

Tabiat kekuasaan juga melekat pada sistem demokrasi. Sistem demokrasi ada justru dibangkitkan oleh pengalaman dan kesadaran, betapa justru kekuasaan itu dari sananya cenderung bersalah guna, maka harus diawasi dan dibatasi.

Apakah hal itu berarti orang baik “vir justus” tidak mempunyai tempat dalam politik ? Tentu saja ada tempat

karena politik menyediakan dan memerlukan beragam tempat dan peran untuk anak-anak bangsa. Di antaranya tempat dan peran pendidikan, pencerahan, pengawasan.

Negara-negara yang sosok dan demokrasinya sudah lebih bekerja dan tertata, dengan disertai berlakunya beragam konvensi, lahan lebih luas dan lebih kondusif untuk beragam sosok dan karakter pribadi.

Lagi pula, ada hal lain yang menjadi pertimbangan mengapa semacam pembatasan – constraints – itu dikemukakan. Yakni untuk memahami dan menyadari, pilihan politik, kerja politik adalah panggilan.

Panggilan hidup yang sekaligus berkembang dan berkinerja sebagai profesi. Karena itu memiliki persyaratan, kode perilaku, dan komitmen dan kemahiran.

Guru bangsa, itulah posisi, fungsi dan pengakuan yang sah dan mulia bagi Prof. Dr. Nurcholish Madjid : Guru bangsa yang utuh paripurna , ya ilmu, ya pengajaran dan pencerahan, ya teladan perilaku.

Saya lupa di mana saya membaca atau mendengar pernyataan Cak Nur ini. Namun pernyataan itu bagi saya mencakup pemahaman keagamaannya secara lengkap – padat : bahwa kita di dunia ini adalah sesama dan bersama dalam peziarahan hidup! Kita adalah sesama dan bersama sebagai peziarah.

Kebenaran dan kenyataan itu amatlah jelas. Keyakinan agama dan cara kita melakukan upacara berbeda-beda tetapi

benar dan nyata, kita adalah peziarah bersama. Dalam peta arahan itu kita bekerja, berkarya, beramal, memberi makna kemanusiaan yang transenden kepada hidup kita.

Pemahaman yang juga dituangkan dalam ungkapan : inklusif dan plural serta terbuka bukankah pernyataan lain dari “peziarahan bersama”. Suatu pernyataan yang ikut diilhami serta diinteraksikan dengan negeri kepulauan kita yang berbhineka. Berbhinneka tunggal ika.

Prof. Dr. Sartono, sejarawan Universitas Gadjah Mada bereputasi internasional. Salah satu pernyataannya yang terus bergema adalah anjuran dan ajakannya agar para terpelajar Indonesia mengembangkan dan menghayati yang ia sebut “asketisme intelektual”.

Saya pahami ungkapan itu sebagai ajakan agar cendekiawan Indonesia menyikapi dan menghayati kecendekiawanannya sebagai panggilan hidup. Bukanlah suatu kebetulan para Bapak Pendiri Bangsa adalah juga kaum cendekiawan pada zamannya. Di antara mereka bahkan cendekiawan berukuran dunia dalam pemikiran kenegaraannya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Apakah mereka mengabdikan kecendekiawanan dan hidupnya dengan semangat “asketis”. Pertanyaan itu bisa dijawab dengan satu contoh. Sebagai sarjana jika mereka memilih bekerjasama dengan pemerintah kolonial, hidup mereka akan lebih dari kecukupan.

Mereka memilih perjuangan lewat cara non – kooperasi. Hidup mereka bukan saja serba pas-pasan dan kekurangan tetapi juga keluar masuk penjara.

Belum banyak berubah perikehidupan warga dan bangsa Indonesia Merdeka yang berusia 60 tahun. Perikehidupan kaum terpelajar dan kaum cendekiawan masih juga dalam kenyataan :asketis”. Guru, dosen, profesor , pegawai dan pejabat negara hidup dalam kenyataan serba pas-pasan, juga ketika lingkungan dicemari kehidupan dan gaya global yang serba bergaya hidup dan berkonsumerisme “wah”.

Kehidupan serba pas-pasan dalam suasana gaya hidup dan konsumerisme tinggi itulah tantangan bagi asketisme intelektual. Lingkungan pun dibuat lebih tidak menunjang oleh suasana dan sisa-sisa suasana korup masa lalu.

Cak Nur termasuk yang diakui setia dan konsisten ,memilih jalan hidup “asketis” asketisme intelektual. Lebih dihormati konsistensi itu, karena kemudian posisinya adalah sedemikian rupa sehingga baginya terbuka peluang untuk berubah jalan dan gaya hidup sederhana. Namun Cak Nur konsisten menghayati sikap hidup “ asketisme intelektual”.

Amat terbatas pengetahuan saya perihal pemikiran dan bacaan hasil karyanya. Dari berbagai sumber saya ketahui sumbangan pemikiran Islam Cak Nur yang berkontribusi “global”.

Tampak gejala yang menarik dalam perikehidupan agama-agama di dunia yang berkembang cepat. Surut dan

matinya paham komunisme menggugat relevannya paham-paham kemasyarakatan yang berpusat pada bidang sosial ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Paham-paham kemasyarakatan didorong untuk mengembangkan pemikiran baru. Ketika yang surut adalah isme yang bukan saja sekuler tetapi sekaligus atheis, masuk akal jika pencarian dan pembaruan paham dan ideologi kemasyarakatan disertai kecenderungan yang menyertakan dimensi “spiritual”. Terlalu dini untuk menarik kesimpulan dari proses itu.

Dalam konteks kekayaan pemikiran Cak Nur dan para Cendekiawan lainnya, relevan kiranya juga membuka cakrawala itu ketika bersama-sama kita mengenang Cak Nur lewat kumpulan karangan ini.

Jakarta, 8 Juni 2006

Jakob Oetama

SYARIAT ISLAM DI NEGARA SEKULAR

Belajar dari Australia

Oleh: Djohan Effendi

Tulisan ini disumbangkan dalam mengenang Cak Nur yang pada awal tahun 70-an mengemukakan agenda sekularisasi dan liberalisasi sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan.

Pendahuluan

Sekularisme adalah paham yang oleh berbagai kalangan umat Islam dipandang sebagai paham yang berbahaya dan mengancam eksistensi agama. Fatwa MUI beberapa waktu lalu yang menghukumi sekularisme, bersama dengan liberalisme dan pluralisme, sebagai paham yang “sesat” adalah bukti yang jelas tentang pandangan ini, yang rupanya diamini oleh kebanyakan gerakan umat Islam di negeri kita. Menurut pandangan sebagian mereka kehidupan bernegara tidak boleh lepas dari kontrol agama dan karena itu pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara mutlak harus dilakukan. Di antara mereka ada yang secara tegas menentang, bukan hanya paham sekularisme yang menganggap urusan agama dan keberagamaan sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh diturut campuri oleh lembaga apapun dan siapapun, sedangkan negara mengurus masalah publik untuk mengatur hidup bersama, akan tetapi juga

menolak sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara serta menempatkan mereka setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan hukum. Sistem demokrasi mereka anggap sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan cita-cita Islam. Demokrasi dalam keyakinan mereka tidak lain daripada sebuah sistem jahiliah dan kufur. Bagi mereka demokrasi adalah ancaman dan musuh Islam.

Agar tidak terjebak dalam wacana teoritis yang hanya berada di awang-awang tulisan ini mengambil contoh konkrit yang hadir dalam realitas kesejarahan saat ini, Australia, yang sebagai sebuah negara demokrasi, dengan sendirinya, menganut dan menerapkan paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme secara konsekuen dan konsisten. Sebab tanpa menerapkan prinsip-prinsip sekularisme, pluralisme (multikulturalisme) dan liberalisme, demokrasi tidak mungkin terwujud. Sengaja saya ambil sebagai kasus Australia sebab di negeri ini juga terdapat sejumlah kecil umat Islam yang merasa keberagamaan mereka terganggu karena sebagai warga negara atau penduduk Australia itu mereka harus patuh pada hukum yang berlaku di negara itu. Mereka merasa menghadapi dilema karena harus tunduk kepada dua hukum: syariat Islam dan hukum Australia yang sekular.

Keharusan tunduk kepada hukum sebuah negara yang diundangkan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi, oleh sebagian kalangan pejuang pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai sikap yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam karena hal itu dinilai sebagai

tindakan menyekutukan Allah dalam bentuk apa yang mereka sebut sebagai “syirik undang-undang”. Sebab, menurut keyakinan dan pemahaman agama mereka, satu-satunya pemegang otoritas dalam membuat undang-undang hanyalah Allah sendiri saja, bukan siapapun atau lembaga apapun selain Dia. Dan karena itu, bagi mereka, negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara adalah bertentangan secara diametral dan frontal dengan ajaran Islam.

Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme dalam Praktek

Australia adalah sebuah negara yang menganut faham sekularisme dimana semua urusan kenegaraan tidak tersangkut-paut dengan agama apapun. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup keberagamaan berada dalam wilayah pribadi yang sepenuhnya merupakan urusan masing-masing orang dan semua agama mempunyai kedudukan yang sama dan setara di muka hukum. Setiap penduduk Australia, warga negara maupun bukan, secara perorangan maupun kelompok, mempunyai kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya untuk, tidak saja melaksanakan akan tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut dan yakini. Para penganut agama diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga-lembaga keagamaan termasuk lembaga pendidikan dan mereka bebas mengajarkan nilai-nilai agama mereka kepada murid-murid lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Sebagai sebuah negara demokrasi sudah barang tentu negara Australia juga menganut dan memegang teguh faham dan nilai-nilai liberalisme yang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Setiap orang bebas apakah dia ingin memeluk agama ataukah tidak memeluk agama, bebas baik mengakui keberadaan Tuhan maupun tidak mempercayai-Nya. Beragama atau tidak beragama, beriman dengan penuh keyakinan akan eksistensi Tuhan, bersikap tidak peduli, ragu atau malahan tidak percaya akan keberadaan-Nya adalah masalah dan pilihan pribadi yang berada di luar wilayah kepentingan dan kontrol negara. Masalah tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi masing-masing dimana setiap orang mempunyai otonomi dan otoritas penuh. Karena itu negara sama sekali tidak campur tangan dengan masalah-masalah keyakinan penduduknya sehingga tidak mungkin merepotkan diri dalam urusan mengakui atau tidak mengakui suatu agama apalagi terlibat dalam perkara sesat-menyesatkan. Negara sepenuhnya bersikap tidak memihak salah satu suatu agama atau aliran keagamaan tertentu. Karena itu kehadiran sebuah lembaga resmi dalam tingkat apapun untuk mengurus agama tidak diperlukan. Hal ini tanggung jawab masing-masing umat beragama yang bersangkutan.

Sebagai sebuah negara yang menerima kehadiran berbagai bangsa dari seluruh dunia Australia menjamin dan memelihara multikulturalisme sebaik-baiknya. Dengan demikian sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Australia

menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya malahan memberikan dukungan kepada semua kelompok etnik yang berasal dari berbagai negeri, tidak peduli agama atau kepercayaan apapun yang mereka anut, untuk memelihara identitas budaya mereka. Ada saat-saat tertentu, yang berlangsung secara rutin setiap tahun, kemajemukan etnik dengan berbagai ciri keunikan masing-masing seperti kesenian, pakaian dan makanan masing-masing dirayakan dengan meriah sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Australia.

Australia: Negara yang Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah adalah bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara dan penduduk tetapnya. Dalam perspektif ini maka Australia adalah sebuah “welfare state”, dimana kesejahteraan warga negara dan penduduknya bukan lagi sekedar cita-cita dan wacana melainkan telah menjadi kenyataan dan masih terus ditingkatkan. Karena itu keberhasilan sebuah pemerintahan terutama diukur oleh keberhasilan dalam mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Negara menjamin agar tidak seorangpun warga negara dan penduduk tetap Australia hidup terlantar karena ketidakcukupan biaya hidup. Setiap orang mendapatkan asuransi kesehatan yang menjamin dan memudahkan mereka memperoleh layanan pengobatan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang tua di atas usia 60 tahun dan orang cacat mendapatkan berbagai kemudahan, keringanan dan santunan yang memadai sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar

untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Negara memberikan uang kepada setiap anak yang lahir dan memberikan tunjangan sampai anak itu dewasa. Negara juga memberikan subsidi kepada janda atau ibu yang menjadi orang tua tunggal bahkan keluarga yang suami atau isteri memilih tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka sehingga penghasilan mereka belum memadai untuk biaya mereka sekeluarga. Begitu pula bagi mahasiswa yang memerlukan biaya untuk belajar di perguruan tinggi juga disediakan beasiswa oleh Pemerintah. Sebab banyak remaja Australia yang menginjak usia 18 tahun memilih lepas dari tanggungan orang tua mereka dan memilih tinggal sendiri serta berusaha hidup mandiri.

Kemudahan dan kenyamanan masyarakat benar-benar diperhatikan. Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar dirasakan. Kakus umum tersedia di berbagai tempat termasuk kakus khusus untuk orang-orang yang cacat dan ruang khusus untuk para ibu yang membawa bayi. Di tempat-tempat tertentu tersedia tempat menitipkan anak agar orang tuanya tidak direpotkan dalam mengurus kepentingannya. Anak-anak memang memperoleh perhatian khusus dari negara, tidak boleh dipukul, ditinggal sendiri tanpa ditemani orang dewasa di rumah. Jaringan dan jumlah transportasi publik benar-benar mencukupi keperluan masyarakat dan berjalan teratur dan tepat waktu sehingga siapapun yang memerlukannya bisa dengan mudah dan nyaman mempergunakannya tanpa membuang-buang waktu. Di lapangan-lapangan parkir disediakan tempat khusus untuk mobil-mobil yang membawa

orang-orang cacat sehingga mereka bisa turun dari kendaraan tidak jauh dari tempat yang dituju. Untuk menjaga keselamatan murid-murid sekolah yang menyeberang jalan waktu pergi dan pulang sekolah di setiap penyeberangan jalan dekat sekolah disediakan orang-orang yang membantu mereka menyeberang jalan dengan aman. Di tempat-tempat rekreasi tersedia sarana yang bisa dipergunakan kalau ingin memasak makanan sehingga mereka yang melakukan rekreasi tidak direpotkan karena harus menyediakannya sendiri dan membawanya dari rumah.

Tidak semua penduduk Australia menguasai bahasa Inggris dengan baik terutama para imigran dan pendatang baru. Mereka penduduk diberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris melalui program khusus yang diperuntukkan bagi mereka secara cuma-cuma. Untuk mempermudah dan memperlancar mereka yang belum menguasai benar bahasa Inggris itu dalam berkomunikasi dengan berbagai lembaga yang mengurus berbagai keperluan mereka, negara juga menyediakan penerjemah gratis yang bisa diminta sewaktu-waktu melalui telepon bebas pulsa untuk berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, Indonesia, Italia, Kanton, Korea, Mandarin, Spanyol, Vietnam dan Yunani. Bahkan kalau benar-benar diperlukan para penerjemah itu bisa diminta datang ke tempat dimana komunikasi langsung antara yang berkepentingan dan pihak lain seperti pasien sakit yang harus konsultasi dengan dokter atau mereka yang mengikuti ujian untuk memperoleh surat izin mengendarai mobil, misalnya, sedangkan biaya perjalanan mereka

ditanggung oleh negara. Selain itu, untuk memudahkan penduduk Australia yang berasal dari berbagai bangsa dan etnik berurusan dengan Kantor Centrelink yang melayani berbagai kepentingan mereka tersedia informasi dalam 67 bahasa bukan Inggris termasuk bahasa-bahasa yang mungkin jumlah penutur di negeri asalnya hanya ratusan ribu orang seperti bahasa Tetum yang dipergunakan penduduk Timor Leste. Juga tersedia program siaran radio dan televisi dalam berbagai bahasa yang diambil langsung dari berbagai negeri.

Secara ekonomi kehidupan masyarakat Australia juga cukup sejahtera. Sistem jaminan sosialnya berjalan dengan lancar dan tertib. Perbedaan antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah tidak tampak kentara. Sistem perupahan para pekerja menjamin pembagian rezeki yang cukup adil bagi penduduk. Mereka yang tergolong berpenghasilan paling rendah pun mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan wajar. Orang tidak terdorong untuk menumpuk-numpuk kekayaan secara berlebihan, sebab makin besar penghasilan seseorang makin besar pula kadar pajak yang harus dia bayar. Dalam pada itu setiap pembayar pajak tidak waswas bahwa pajak yang mereka bayar diselewengkan atau tidak akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu tingkat kejujuran penduduk untuk membayar pajak sangat tinggi sebagaimana juga tingkat kejujuran petugas pajak juga tidak disangsikan. Kehidupan masyarakat Australia tumbuh dalam semangat saling percaya. Berbohong dalam kehidupan masyarakat Australia adalah sebuah cela dan aib besar.

Tindak kekerasan merupakan kejahatan yang sangat ditabukan di negeri ini. Jangankan antara sesama warga masyarakat biasa, guru yang memukul muridnya bahkan orang tua yang memukul anaknya sendiri diancam dengan hukuman pidana. Karena itu kejahatan dalam bentuk kekerasan dan penganiayaan fisik apalagi pembunuhan bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Nyawa manusia sangat dihargai sehingga hukuman mati telah lama dicabut dari hukum pidana Australia. Tidak hanya manusia, kehidupan hewan pun dilindungi. Menelantarkan, menyakiti apalagi membunuh hewan tanpa alasan merupakan tindakan terlarang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Hukum dalam kehidupan masyarakat berlaku tanpa pilih bulu. Tindakan melanggar hukum berakibat fatal, bukan hanya menyebabkan nama baik seseorang tercela akan tetapi juga mencederai karir masa depannya. Kepastian hukum yang tidak mungkin diselewengkan dalam wujud kedaulatan hukum yang berlaku secara faktual dan dapat dirasakan oleh masyarakat memungkinkan kehadiran sebuah pemerintahan yang baik dan kesadaran hukum warga negara yang melahirkan ketertiban sosial sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Adakah Cetak Biru dari Langit?

Dengan mengemukakan kasus Australia, yang tentu beberapa negara demokrasi lain yang sama-sama menganut faham sekularisme yang mungkin lebih baik taraf kesejahteraan penduduknya dan lebih baik sistem pelayanan

publiknya, saya hanya ingin mengajak pembaca untuk bersikap kritis dalam menanggapi pandangan yang secara apriori menganggap sistem demokrasi bertentangan dengan cita-cita Islam. Dengan sendirinya kitapun perlu bersikap kritis terhadap agenda pelaksanaan syariat Islam, baik dalam tataran lokal, nasional maupun mondial melalui institusi kekhilafahan, yang akhir-akhir ini sangat gencar diwacanakan sebagai satu-satunya solusi tantangan yang dihadapi umat Islam dengan cara pandang yang bersifat idealisasi dan absolutisasi. Sebab hingga saat ini anggapan semacam ini masih merupakan utopia yang belum pernah terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan negeri-negeri Islam sendiri. Sejarah kekhilafahan bukanlah sejarah tanpa cacat. Tarikh umat Islam mencatat berbagai peristiwa berdarah yang terjadi sejak di masa permulaan dan justru sangat ironis karena melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Sejarah kekhilafahan tidak bebas dari pertumpahan darah yang mengerikan dan memilukan, dan setiap pergantian dinasti kekhilafahan berlangsung dengan kekerasan dan nyaris selalu ditandai oleh penumpasan dinasti kekhilafahan yang baru terhadap dinasti kekhilafahan yang terdahulu. Terbelahnya umat Islam dalam dua buah sekte besar Sunni dan Syi'ah akibat konflik kekhilafahan yang akhir-akhir ini malah makin terasa di Timur Tengah bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perang saudara akibat konflik sektarian di Irak dan bisa saja terjadi juga di Libanon.

Salah satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya sudah menjadi masalah perbedaan pendapat di kalangan

ulama Islam sejak mula adalah apakah keperluan sebuah pemerintahan didasarkan atas “dalil naqliyah” sehingga penegakan sebuah pemerintahan merupakan kewajiban agama ataukah didasarkan “dalil aqliyah” dan karena itu penegakan sebuah pemerintahan tidak lebih dari jawaban terhadap tuntutan objektif untuk mengatur kehidupan bersama umat manusia sendiri. Dilihat dari fakta kesejarahan jelas sekali bahwa sebenarnya kehadiran sebuah pemerintahan adalah bagian dari proses pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu suatu sistem pemerintahan bersifat kontekstual yang lahir dari pengalaman kesejarahan umat manusia untuk meneguhkan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang hidup dan berkembang dalam dimensi ruang dan waktu yang menuntut ketertiban hidup bersama.

Sebagian penganjur pelaksanaan syariat Islam agaknya berpandangan bahwa kehidupan berpemerintahan haruslah dikelola berdasarkan cetak biru dari langit dan manusia tinggal melaksanakannya. Dalam kenyataannya apa yang dianggap sebagai cetak biru adalah formula-formula yang dirumuskan berdasarkan pemahaman dan penafsiran para ulama. Tidak jarang timbul kesan bahwa para perumus formula syariat di masa modern ini seolah-olah berpretensi sebagai pemegang tunggal kebenaran. Hal itu terkait dengan apa yang kita rasakan selama ini sebagai kecenderungan sikap absolutisasi pemahaman sendiri sebagai mutlak benar dan secara serta merta menganggap pemahaman orang lain sebagai salah, sesat dan berbahaya dan karena itu harus dibabat. Sikap yang

memonopoli kebenaran apalagi disertai oleh pemaksaan kehendak terhadap orang lain yang berbeda pendapat akan menimbulkan pertanyaan apakah benar Islam adalah agama yang membawa salam, rahmat dan berkah bagi umat manusia.

Pertama-tama perlu disadari apa yang dipahami sebagai ajaran agama yang dinamakan sebagai syariat Islam, bagaimanapun adalah pemahaman dan penafsiran manusia yang terbatas kemampuannya sebagai makhluk Tuhan. Ia bersifat insani sehingga kebenarannya bersifat relatif dan tidak bisa dimutlakkan. Kehadiran berbagai mazhab, teologi, fiqih maupun tasawuf dalam khazanah tradisi keilmuan Islam sepanjang sejarah, walaupun sama-sama berangkat dari sumber yang sama, al-Quran dan Sunnah Nabi, menunjukkan tak ada penafsiran yang bisa dianggap sebagai mutlak benar. Perlembangan dalam dunia tafsir al-Qur'an yang ditandai oleh kehadiran berbagai aliran pemikiran dan disiplin keilmuan yang mau tidak mau mempengaruhi pemahaman terhadap Kitab Suci tersebut sehingga tidak satu tafsiran yang bisa dianggap final dan mutlak.

Manusia adalah makhluk berakal yang dibatasi oleh ketidaksempurnaan pengetahuannya dan ketidakbebasannya dari pengaruh lingkungan sosio-historisnya. Ketika seseorang menyampaikan sebuah konsep sebagai ajaran agama maka konsep itu adalah pemahaman dan penafsirannya sendiri yang bagaimanapun keahliannya tetap relatif sifatnya sehingga terbuka untuk diperdebatkan. Ungkapan “wallahu a’lam bishshawab” sebagai kata akhir dalam setiap pendapat atau fatwa ulama-ulama bahkan imam-imam mazhab di masa lalu

menunjukkan mereka menyadari sepenuhnya bahwa pendapat atau fatwa mereka sama sekali tidak mutlak kebenarannya dan mengakui hak orang lain untuk mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat mereka. Sikap Imam Malik yang menolak keinginan Khalifah al-Manshur untuk menjadikan buku beliau, al-Muwaththa, sebagai rujukan dan pegangan resmi yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam menunjukkan betapa kesadaran beliau bahwa pendapat beliau tidak mutlak benar.

Sangat boleh jadi kecenderungan absolutisasi pendapat sendiri sebagai kebenaran yang tak perlu diragukan yang membuat ungkapan yang menyiratkan kearifan dan kerendahan hati tersebut sudah sangat jarang dipergunakan digantikan oleh tuduhan dan tudingan yang menghakimi dan memojokkan seperti sesat, murtad, zionis, budak orientalis dan ungkapan sebangsanya. Bahkan tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan kehendak dan main hakim sendiri seperti kekerasan, perusakan dan pengusiran dilakukan terhadap mereka yang dianggap berfaham sesat atau melakukan pelanggaran syariat padahal Allah sendiri sebagai Pencipta dan Pemilik langit dan bumi memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kufur terhadap-Nya dan mempersilahkan mereka tanpa diskriminasi untuk hidup dan berkembang biak di atas bumi-Nya dan memanfaatkan segala yang ada di dalam alam ciptaan-Nya.. Hal ini terjadi justru pada saat mereka belum memegang kekuasaan formal, sehingga timbul kekhawatiran betapa mengerikannya

kehidupan masyarakat kita kelak kalau mereka benar-benar berkuasa?

Kecenderungan absolutisasi pendapat dan monopoli kebenaran tersebut tidak menyisakan lagi ruang perbedaan pendapat. Bagi mereka Islam hanya satu dan itu adalah Islam menurut pemahaman dan penafsiran mereka sendiri. Padahal dalam kenyataan perbedaan pendapat itu tidak pernah absen dalam setiap dan semua masalah keagamaan. Nyaris semua formula yang dipahami sebagai syariat Islam tidaklah tunggal dan tidak akan pernah tunggal. Jangankan berkenaan dengan masalah-masalah muamalat yang pada dasarnya longgar sesuai dengan prinsip “semuanya diperbolehkan kecuali yang terlarang” akan tetapi juga dalam masalah-masalah “ibadah mahdhah”, yakni tata cara murni ritual peribadatan, sesuai dengan prinsip “semuanya terlarang kecuali yang diperbolehkan”, terdapat berbagai pendapat yang tidak hanya berbeda akan tetapi tidak jarang bertentangan satu sama lain. Seharusnya dalam masalah-masalah ibadah tidak ada perbedaan karena semuanya mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tapi kenyataannya perbedaan bahkan pertentangan pendapat terjadi dan masing-masing menganggap bahwa cara merekalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Apalagi dalam masalah-masalah bukan ibadah yang bersifat “ijtihadiah”, yang merupakan hasil pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan para ulama yang pasti tidak akan pernah sepi dari “khilafiyah” atau silang sengketa pendapat.

Mengingat kenyataan bahwa keragaman pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan tersebut bukan sekedar asumsi melainkan kenyataan faktual yang selama ada maka tidaklah dimaksudkan sekedar mencari-cari kalau timbul pertanyaan syariat Islam yang mana yang mau ditegakkan, syariat Islam versi Sunni atau versi Syi'ah? Syariat Islam menurut faham ahlus sunnah wal jama'ah berdasarkan Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syfi'i atau Hanbali, yang masing-masing mengandung perbedaan pendapat ataukah menurut faham ahlus sunnah wal jama'ah berdasar pemahaman kaum salafi ala Wahabi yang menganggap pendapat selain pendapat mereka adalah salah? Ataukah mengikuti konsep yang dikembangkan oleh kalangan Ikhwani Muslimin di Mesir, Jama'ati Islami di Pakistan, dan Partai Islam Semalaysia di Malaysia? Ataukah kita merujuk ke berbagai negeri Islam yang selama ini menyatakan sebagai Negara Islam seperti Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, berbagai Kesultanan di kawasan Timur Tengah, atau juga Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Ataukah mengikuti konsep Hizbut Tahrir yang memperjuangkan penegakan kembali Imperium Islam sebagai penguasa dunia melalui peleburan dan penyatuan semua negeri-negeri muslim menjadi satu kesatuan politik di bawah kekuasaan tunggal seorang Khalifah? Belum jelas benar bagaimana proses penunjukan seorang Khalifah. Kalau ditunjuk oleh lembaga yang disebut "ahlul halli wal aqdi" siapa yang menentukan anggota lembaga tersebut, berapa jumlahnya, dan siapa yang menentukan seseorang bisa ditunjuk sebagai anggota lembaga.

Cita-cita Islam: Hanya Satu Perspektif?

Melihat kehidupan bernegara di Australia yang tegas-tegas menganut paham sekularisme seperti digambarkan di atas itu timbul pertanyaan bagaimana fenomena tersebut dilihat dari perspektif ajaran Islam? Apakah sebuah negara demokrasi sekuler semacam Australia itu benar-benar bertentangan dengan cita-cita Islam sebagaimana dipersepsi oleh kalangan pejuang pemberlakuan syariat Islam selama ini? Kalau ukuran pelaksanaan ajaran Islam itu adalah berlakunya hukuman qisas bagi kejahatan pembunuhan atau penganiayaan fisik, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi peminum minuman keras dan penjudi, rajam atau cambuk bagi pezina, misalnya, maka jelas hukum di Australia tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi apakah ukuran keterwujudan ajaran Islam dalam masyarakat tidak bisa diukur dengan perspektif yang lain, yang tidak sekedar literal, simbolik dan eksklusif akan tetapi lebih bersifat substantif, fungsional dan inklusif?

Dalam kepustakaan Islam klasik dikenal konsep “masalah ‘ammah”, yani kemaslahatan publik atau kesejahteraan masyarakat. Terdapat ungkapan bahwa pengelolaan pemerintahan terkait dengan tujuan memaslahatkan rakyat. Maka itu konsep “masalah ‘ammah” itu sangat relevan untuk dipakai sebagai ukuran penilaian keterwujudan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat. Dalam perspektif ini tak ayal lagi Australia tergolong negara yang cukup berhasil dalam mewujudkan “masalah ‘ammah” dalam wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

keterpenuhan hajat hidup layak setiap penduduk sehingga tak ada orang yang hidup terlantar kecuali karena olahnya sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam kaitan dengan umat Islam sendiri, misalnya, bisa dikatakan bahwa tak seorangpun muslim di Australia selama ini yang merasa dirinya tergolong mereka yang berhak menerima zakat? Yang terjadi adalah mereka mengumpulkan zakat harta, zakat fitrah dan korban dalam bentuk uang dari masyarakat muslim Australia dan mengirimkannya ke negeri-negeri Islam dimana terdapat masih banyak kaum “fuqara dan masakin” bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Boleh jadi juga kita bisa melihatnya dari segi keterjaminan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari perspektif ini kita menyaksikan bahwa keamanan dan keselamatan warga masyarakat dari berbagai bentuk gangguan terhadap diri dan harta bendanya cukup terjamin. Rumah-rumah bisa ditinggalkan tanpa dikunci, mobil bisa dibiarkan di jalan tanpa dimasukkan ke dalam garasi yang terkunci rapat. Hewan-hewan ternak dibiarkan lepas begitu saja di padang-padang rumput yang disediakan sebagai lahan peternakan tanpa ada penjaga kecuali sekedar pagar yang mengitarinya agar tidak berkeliaran lepas dan masuk ke lahan orang lain. Pemiliknya hanya datang sewaktu-waktu untuk mengontrol ketersediaan makanan ternaknya. Ini tidak berarti tidak ada pencurian akan tetapi kasus ini sangatlah jarang terjadi walaupun tidak ada ancaman hukuman potong tangan. Sangat jarang terlihat polisi di jalan-jalan dan sedangkan kantor polisi juga terlihat sepi-sepi saja. Kritik dan ungkapan

rasa kecewa terhadap kinerja kepolisian boleh dikatakan tidak terdengar selama ini. Malahan akhir-akhir ini diberitakan bahwa polisi diperkenankan merangkap pekerja di luar tugas rutin sebagai polisi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat sudah cukup baik.

Dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, yakni jaminan untuk memperoleh hidup yang layak dan rasa aman maka rasa-rasanya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa negeri Kangguru ini cukup Islami kalau kita menganggap ajaran Islam mementingkan kemaslahatan masyarakat, bahkan jauh lebih Islami dibandingkan dengan negeri-negeri Islam sendiri, dimanapun. Maka tidaklah mengherankan apabila Australia dan beberapa negeri-negeri sekuler lainnya menjadi tempat tujuan hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari orang-orang Islam dari berbagai negeri muslim.

Masyarakat Berakhlak: Agenda Bersama

Dalam usaha mewujudkan cita-cita Islam maka agenda Nahdlatul Ulama yang lebih menekankan pada pengembangan Islam dalam kerangka pembangunan etika sosial dan bukan pada formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sejalan dengan pemikiran di atas dan perlu dikembangkan. Agenda ini saya rasa sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana terungkap dalam sabda beliau sendiri: “Sesungguhnya aku dibangkitkan hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Saya rasa sabda Nabi Muhammad s.a.w. ini

menjelaskan ungkapan yang berbeda dalam Al-Qur'an tentang misi kerasulan beliau sebagaimana termaktub dalam ayat: "Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". Dengan demikianlah bisa dipahami bahwa cita-cita universal untuk membangun manusia dan masyarakat yang bermoral sehingga terwujud kehidupan yang penuh rahmat.

Membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia adalah cita-cita semua agama. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah dari mana kita harus mulai. Saya rasa kita harus mulai dari pengembangan "Golden Rule", Undang-Undang Emas yang disebut juga "The Ethic of Reciprocity", Etika Timbal Balik, yang mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai Etika Timbang Rasa, bisa dianggap sebagai ide dasar untuk membangun "Global Ethic" dalam membangun sebuah dunia yang damai. Nilai dan norma fundamental dan universal yang menafasi Etika Global itu berbagai ungkapan yang terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan yang esensinya sama, yakni: "Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan". Ini berlaku bagi orang seorang dan juga berlaku bagi institusi negara. Hanya dengan Etika Timbang Rasa inilah akan terwujud ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Sebenarnya nilai kebajikan yang terekam dalam "Golden Rule" tersebut merupakan titik temu semua agama yang sangat menekankan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kecintaan dan penghargaan terhadap sesama dan timbang rasa pada penderitaan orang lain. Untuk

memperjelas keterkaitan “Golden Rule” itu dengan ajaran agama-agama ada baiknya kita simak ungkapan di bawah ini:

Baha’i: Jangan anggap siapapun yang kalian tidak ingin anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkatilah orang yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. (Baha’ullah)

Buddha: Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang kamu sendiri merasakan rasa sakit. (Udana-Varga 5:18)

Hindu: Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu. (Mahabharata 5:1517)

Islam: Tidaklah beriman salah salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. (Al-Hadits)

Jain: Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. (Lord Mahavira, Tirthankara ke-16)

Kong Hucu: Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu. (Analects 15:23)

Kristen: Segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka. (Matius 7:12)

Shinto: Hati seseorang di hadapanmu adalah bagaikan sebuah cermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ. (Ko-jiki Hachiman Kasuga)

Sikh: Tak seorangpun musuhku, tak ada orang asing, setiap orang sahabatku. (Guru Arjan Dev.:AG 1299)

Tao: Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu sendiri, dan kerugian tetanggamu sebagai kerugianmu sendiri. (Tai Shang Kan Ying P'ien)

Yahudi: Apapun yang menyakitkanmu jangan lakukan terhadap orang lain. (Talmud, Shabbat 31a)

Zarathustra: Apapun yang tidak enak untuk dirimu sendiri jangan lakukan pada orang lain (Shayast-na-Shayast 13:29).

Penutup

Dengan mengatakan pelayanan publik yang dialami warga negara dan penduduk Australia lebih Islami dibanding negeri-negeri Islam sendiri tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Australia mengambil inspirasi dari ayat-ayat Tuhan yang termaktub dalam Kitab Suci melainkan dari ayat-ayat Tuhan yang dapat dibaca dari dunia peristiwa. Australia mencapai kemajuan dan kesejahteraan bukan karena berangkat dari sebuah cetak biru dari langit akan tetapi karena belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman negeri-negeri lain melalui proses kesejarahannya sendiri dan apa yang telah dicapainya saat ini adalah hasil pergumulannya dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.

Belajar dari kasus Australia ini, saya rasa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita yakini sebagai cita-cita Islam tidak perlu kehadiran seorang khalifah yang dalam kenyataan sejarah selama berabad-abad merupakan penguasa tunggal yang berkuasa seumur hidup atau cetak biru dari langit yang dalam kenyataannya merupakan hasil rumusan para ulama yang tidak bebas dari kekurangan sebagaimana juga untuk menjadi muslim yang baik tidak perlu menonjolkan ciri-ciri simbolik dan eksklusif seperti memakai cadar, jubah, sorban atau memelihara jenggot yang memberi kesan bahwa seorang muslim harus berpenampilan tersendiri dengan ciri-ciri yang kentara berbeda dari orang lain. Sebab bukankah Tuhan tidak memandang tubuh dan penampilan kita melainkan memandang hati dan perbuatan kita? Bukankah syariat itu bukanlah sekedar formula yang merupakan tujuan pada rumusannya melainkan jalan untuk mewujudkan tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat? Karena itu mengapa kita tidak mengarahkan perjuangan kita pada perwujudan nilai-nilai Islam yang lebih bersifat manusiawi dan universal yang menjadi cita-cita umat manusia pada umumnya sehingga semua orang merasakan bahwa cita-cita itu adalah cita-cita mereka juga? Di sini kita berhubungan dengan masalah-masalah yang lebih substantif dan bukan formula, pada isi dan bukan kulit. Nilai-nilai yang bersifat substantif itulah yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat sedangkan formula implementatif bersifat kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akhirnya, menyimak pengalaman negeri-negeri maju yang semua adalah negara-negara sekuler, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak ditentukan apakah negeri itu beragama atau tidak melainkan oleh kepastian hukum yang berlaku bagi semua dan pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat. Sedang keberagamaan kita ditentukan oleh penghayatan kita masing-masing dan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini.

Wallahu a'lam bishshawwab.

Geelong, 10 Oktober 2006

CAK NUR SEORANG PEJUANG KEBEBASAN

Oleh: Dr. Chandra Setiawan

Awal Perkenalan

Pada penghujung tahun 1995 saya memutuskan menjadi aktivis lintas agama dengan bergabung secara aktif di Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) Jakarta. MADIA merupakan wahana perjumpaan dialogis antar pemeluk agama dan kepercayaan. Dialog pertama MADIA disponsori Yayasan Wakaf Paramadina. Penggunaan fasilitas Yayasan Wakaf Paramadina untuk mengadakan dialog/seminar lintas agama di mana saya berusaha senantiasa aktif membuat peluang saya untuk berjumpa dan mendengarkan ceramah-ceramah Cak Nur secara langsung. Di samping itu saya juga kadang-kadang hadir mendengarkan kuliah-kuliah Cak Nur yang kadangkala juga dapat dihadiri di luar peserta kursus Studi Islam. Misalnya pada tahun 1996, tepatnya 1 November 1996, penulis juga menyempatkan hadir pada Acara Peringatan Ulang Tahun ke 10 Yayasan Wakaf Paramadina untuk mendengar Cak Nur berpidato. Sampai saat ini (Mei 2006) makalah pidato Cak Nur berjudul, "Memberdayakan Masyarakat, Menuju Negeri Yang Adil, Terbuka dan Demokratis" masih penulis simpan dan kadang-kadang membacanya lagi, dan mengingat bagian-bagian penting dari pidato tersebut, antara lain, "*Masyarakat berperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang*

dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya, keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia itu harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para Rasul, agar mereka “makan dari yang baik-baik dan berbuat kebaikan”. Di dalam Ajaran Agama Khonghucu ada ayat-ayat suci senada dengan yang diungkapkan Cak Nur di atas, terutama mengenai iman dan kebaikan, antara lain berbunyi, “Iman itu harus disempurnakan sendiri, dan Jalan Suci itu harus dijalani sendiri pula” (Zhong Yong XXIV:1). Adapun Jalan Suci yang dibawakan Ajaran Besar (Da Xue) ini, ialah menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya (Ming De), mengasihi rakyat, dan berhenti pada Puncak Kebaikan” (Da Xue Bab Utama:1).

Melibatkan Cak Nur Pada Kegiatan Lintas Agama

Pada tahun 1997 penulis bersama-sama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., Budhy Munawar, Bondan Gunawan dll mendirikan Yayasan Nur Kebajikan, dan pada waktu peluncuran Yayasan, 16 April 1997 kami mengadakan Seminar dengan menampilkan dua pembicara, yakni Cak Nur dan Th. Sumartana. Adapun tema seminar pada waktu itu, “Kebebasan Beragama Dan Wawasan

Kebangsaan". Pemilihan kedua pembicara di atas, berdasarkan keputusan rapat yang juga dihadiri Gus Dur. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur pun menghargai kecendikiaan Cak Nur. Kami melihat kedua tokoh di atas dapat membahas ke topik di atas, karena kami pada waktu itu prihatin adanya kecenderungan penggunaan agama untuk kepentingan politik dan menguatnya sektarianisme berdasarkan agama. Di samping sikap pemerintah (c.q. Departemen Agama) yang hanya "mengakui" lima agama, dengan tidak memberi ruang yang cukup untuk agama-agama di luar lima agama yang "diakui" dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkenalan saya dengan Cak Nur, juga mendekatkan saya dengan Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang lain, yakni Utomo Dananjaya. Mas Tom juga mengetahui dengan baik masalah peminggiran umat Khonghucu oleh pemerintah Orde Baru. Karena kedekatan hubungan Mas Tom dengan Menteri Agama pada waktu itu Prof. A. Malik Fajar, maka dengan jasa baik Mas Tom pulalah, Pengurus MATAKIN dapat diterima Menteri Agama di ruang kerjanya, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4- Jakarta Pusat dengan didampingi Mas Tom. Pada waktu itulah kami menyampaikan rencana MATAKIN untuk melaksanakan MUNAS MATAKIN pada tanggal 22-23 Agustus 1998 dan meminta Menteri Agama memberi dukungan fasilitas tempat, akhirnya Menag menjanjikan untuk dapat menggunakan asrama Haji. Salah satu keputusan MUNAS MATAKIN XIII adalah memerintahkan kepada Ketua Umum terpilih untuk menemukan sejumlah

tokoh untuk dimohonkan kesediaannya menjadi Anggota Kehormatan MATAKIN. Kesediaan Cak Nur menjadi anggota kehormatan MATAKIN sejak tahun 1998 sungguh melegakan hati saya sebagai Ketua Umum MATAKIN (periode 1998-2002). Pada bulan Oktober 1998 saya bertemu dengan Cak Nur di kantor Paramadina yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Indah Plaza, Kav. UA 20-21 Jakarta Selatan. Saya menjelaskan kepada beliau mengenai Amanat Musyawarah Nasional MATAKIN XIII yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 Agustus 1998 di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta Timur yang menugaskan kepada saya untuk memohon kesediaan beberapa orang seperti Abdurrahman Wahid, Almarhum Dr. Th. Sumartana, Djohan Effendi, Budhy Munawar-Rachman untuk menjadi anggota kehormatan MATAKIN. Kami memandang orang-orang tersebut di atas telah berjasa, karena turut memperjuangkan eksistensi umat dan agama Khonghucu di Indonesia. Setelah menjelaskan bahwa orang-orang yang disebutkan di atas semuanya telah menyatakan kesediaannya. Mohon kiranya perkenan Cak Nur, sambil menyampaikan kepada beliau surat keputusan MATAKIN tertanggal 8 Oktober 1998. Tanpa berfikir lebih lama, beliau berkata singkat, yang kurang lebih berbunyi, "kalau memang dipandang kesediaan saya memberikan kemaslahatan kepada umat Khonghucu, maka saya bersedia", diikuti pembubuhan tanda tangan beliau pada surat keputusan termaksud. Saya sangat kagum dengan Cak Nur yang mampu berfikir positif dan mempercayai omongan saya. Cak Nur benar-benar mampu mengamalkan ajaran bahwa manusia pada dasarnya baik.

Saya berkesempatan bertemu dan bersama-sama Cak Nur menghadiri *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) Assembly VII di Amman, Jordania. Hadir pula pada waktu itu antara lain: Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, dll. Pada waktu itu delegasi dari Indonesia yang hadir puluhan, tetapi tidak mewakili organisasi secara resmi, hanya terdiri dari unsur-unsur: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun Indonesia tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan. Untuk itu Cak Nur diminta untuk mewakili Indonesia menyampaikan laporan mengenai kegiatan lintas agama di dalam mempromosikan perdamaian, beliau mengajak semua unsur di atas, termasuk saya untuk ikut naik ke panggung mewakili Indonesia.

Kesediaan beliau mengajak saya untuk bersama-sama ke atas panggung mengandung kenangan tersendiri, mengingat pada waktu itu Agama Khonghucu di mata Departemen Agama bukanlah agama yang diakui keberadaannya. Dan beliau dengan bahasa Inggris yang fasih (tanpa teks) memperkenalkan kami kepada peserta satu-per satu, lalu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi lintas agama di Indonesia. Posisi Gus Dur yang pada WCRP Assembly VI terpilih sebagai salah satu Presiden WCRP harus digantikan mengingat Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia. Gus Dur mencalonkan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif untuk menggantikan posisinya. Dan delegasi dari Indonesia sepakat mendukungnya. Saya sendiri sebagai peserta yang

mendapat hak suara senantiasa menyertai Prof Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang akhirnya terpilih dan disetujui pada WCRP Assembly VII untuk menjadi salah satu presiden dari WCRP untuk menggantikan posisi Gus Dur sebagai wakil Asia. Di saat pulang, Cak Nur menggunakan pesawat yang sama dengan saya, sehingga saya berkesempatan untuk berdialog dengan beliau, terutama pada waktu kami menghabiskan waktu yang cukup lama, menanti pesawat yang akan membawa kami pulang dari airport internasional Abu-Dhabi ke Jakarta.

Setibanya kami kembali ke Tanah Air, setelah mengikuti WCRP Assembly VII di Amman, Jordania di atas, semangat untuk mendirikan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) menghangat dan mendapat dukungan penuh dari Gus Dur. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 2000 ICRP berhasil dideklarasikan di Jakarta yang dihadiri pula oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Republik Indonesia. Cak Nur bersama-sama tokoh-tokoh agama yang berpengaruh di negeri ini duduk sebagai Anggota Dewan Kehormatan di dalam ICRP yang ketua umumnya Dr. Djohan Effendi.

Pemikiran Cak Nur Tentang HAM

Pemikiran-pemikiran Cak Nur di dalam menyikapi kemajemukan dan juga mengenai hak asasi manusia membuat saya merasa dekat dengan beliau, walaupun pertemuan-pertemuan langsung tidaklah terlampau sering. Ketika saya harus menulis makalah sebagai persyaratan menjadi calon anggota Komnas HAM pun saya tak lupa mengutip pendapat Cak Nur yang tertuang dalam tulisan beliau berjudul, "HAM,

Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional”¹ yang dimuat di dalam buku, “HAM Dan Pluralisme Agama”, beliau menyampaikan antara lain,”..... Untuk dapat berbicara tentang HAM dengan baik, seseorang memerlukan komitmen yang tulus. Dan komitmen yang tulus selalu berakar dalam kesadaran tentang makna dan tujuan hidup, yang umumnya diajarkan oleh agama. Tanpa akar keagamaan, pengertian tentang HAM dan komitmen kepada nilai-nilainya dapat terasa hambar dan dangkal”.

Ketika saya benar-benar dipercaya menjadi anggota Komnas HAM untuk periode 2002-2007 saya menjadikan pendapat beliau di atas sebagai pegangan. Ajaran agama saya (baca: Khonghucu) memandang, “Di Empat Penjuru Lautan, Semua adalah Bersaudara”. Memperlakukan orang secara setara (tidak diskriminatif) tanpa memandang agama, suku, ras, etnis, golongan adalah kewajiban setiap orang, terlebih bagi saya selaku anggota Komnas HAM. Oleh karena itu di dalam melayani pengaduan, memantau suatu peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang terjadi dan melibatkan berbagai komunitas Agama, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saya selalu menanggapi dengan antusias dan sepenuh hati.

Cak Nur sangat memahami hak asasi manusia yang universal itu, dan dapat menunjukan bahwa ajaran agama Islam menjunjung HAM. Cak Nur mampu membumikan nilai-

¹ Anshari Thayib, et.al (editor)., “HAM Dan Pluralisme Agama”, PKSK, Surabaya, 1997, p.57

nilai Islam dalam kehidupannya. Cak Nur sangat menekankan pentingnya kebebasan pribadi yang bertanggung jawab. Cak Nur berkeyakinan, kebebasan adalah dasar kebahagiaan: hanya orang yang bebas yang dapat benar-benar merasakan kebahagiaan. Kebebasan merupakan prasarana produktivitas yang utama, baik di bidang pemikiran maupun barang. Beliau pernah mengutip sebuah pepatah Arab yang mengatakan, "Tidak ada sesuatu apa pun yang lebih berharga daripada kebebasan....".

Cak Nur berkeyakinan bahwa kelak di akhirat nanti setiap individu harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya secara individual. Salah satu wujud kebebasan yang harus disyukuri rakyat Indonesia sebagai buah reformasi adalah kebebasan pers. Berulang kali hal ini dikatakan beliau secara terbuka, maupun disampaikan ketika kami berbincang-bincang. Beliau menginginkan setiap orang Indonesia untuk mempertahankan dan menjaganya, sedemikian rupa sehingga menjadi berkah bagi seluruh warga tanpa kecuali. Kebebasan Pers, menurut beliau dengan segala kekurangannya jangan sampai dirampas. Karena beliau yakin dengan adanya Kebebasan Pers banyak hal di negara ini dapat dikontrol. Cak Nur juga berkeyakinan bahwa peradaban dan masyarakat yang teratur, "*civil society*" memerlukan kebebasan sebagai fondasi.

Cak Nur menambahkan kebebasan meliputi beberapa hak asasi politik, yaitu hak untuk memberi suara, memegang jabatan, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan politik, berserikat dengan sesama warga yang

memiliki kesamaan pandangan, dan untuk mengkritik pemerintah. Semua hak itu, sebagai aspek positif kebebasan, didasarkan atas keinsafan bahwa kebebasan yang tidak terbatas akan segera menuju kepada anarki hukum rimba dan menangnya yang kuat atas yang lemah. Masyarakat yang beradab dan adil tidak mungkin terwujud tanpa suatu susunan sosial dan hukum.

Di dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Menurut Cak Nur, sejak 15 abad terakhir ini manusia harus dipandang sebagai makhluk yang dewasa, yang perkembangan budayanya telah dapat memperkuat kemampuan primordialnya untuk mengenali yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang palsu. Karena begitu asasnya kemerdekaan nurani ini, maka biarpun seorang yang mengetahui dengan pasti tentang apa yang benar dan yang sejati—seperti para Nabi dan Rasul, misalnya—tidak diperkenankan Allah memaksakan pengetahuannya itu kepada orang lain. Mereka yang meyakini suatu kebenaran dan kesejatan, serta meyakini pula bahwa kebenaran dan kesejatan itu akan membawa keselamatan dan kebahagiaan orang lain, dibolehkan hanya sampai tingkat memberi peringatan kepada orang lain itu, dan hanya sampai tingkat memberi peringatan kepada orang lain itu, dan hanya sampai

kepada tingkat mengajak dengan hikmah-kebijaksanaan, keterangan persuasif yang penuh pengertian, dan argumentasi dialektis yang menyakinkan. Karena itu para Rasul pun hanya bertugas memberi peringatan seperti itu, dan sama sekali tidak diberi tugas untuk memaksa atau menguasai orang lain.

Pemikiran Cak Nur di atas disampaikan sekitar 10 tahun lalu, tetapi masih sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana sektarian berdasarkan agama menguat. Kejadian penyerangan terhadap jemaat Islam Ahmadiyah di berbagai tempat, misalnya, kalau dikaitkan dengan pemahaman Cak Nur di atas terhadap ajaran Islam menunjukkan kontradiksi. Para penyerang, pelaku tindak kekerasan justru mengatasnamakan Islam. Sesungguhnya bagi orang di luar Islam menjadi bingung menemui realita seperti di atas.

Kalau kita beranjak dari pemikiran Cak Nur di atas, penggunaan kekerasan tentu tidak dibenarkan, tetapi dalam kenyataannya sekelompok masa dalam jumlah besar sering menggunakan kekerasan dan memaksa kehendaknya atas nama Islam, bahkan seakan-akan polisi di negara ini tidak dianggap dan dipercaya lagi, tetapi mengapa hal ini tetap dibiarkan? Kalau pemikiran Cak Nur itu benar adanya, pertanyaannya mengapa tidak ada (baca: tidak banyak) yang menyuarakannya dengan suara nyaring agar ajaran Islam yang begitu “sejuk” dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di negeri ini bisa dirasakan oleh semua orang di negeri ini?

Pendapat Cak Nur Tentang Kebajikan

Di dalam agama Khonghucu sangat ditekankan Kebajikan, bahkan salam umat Khonghucu bunyinya, "*Wei De Dong Tian*" , yang artinya "Hanya Oleh Kebajikan Tian, Tuhan Berkenan", Lalu yang mendengarnya menjawab, "*Xian You Yi De*", Sungguh Miliki Yang Satu Itu: Kebajikan". Seluruh hidup umat Khonghucu tidak lain adalah persiapan guna menghadap Tuhan, dan harus berusaha untuk memperoleh perkenan atau ridla-Nya. Hal senada dalam Ajaran Islam diungkapkan oleh Cak Nur bahwa:

"Berusaha memperoleh perkenan atau ridla Tuhan berarti berusaha menempuh hidup yang diresapi oleh rasa Kebajikan dan diilhami oleh keyakinan kepada kebenaran. Berusaha memperoleh perkenan Ilahi dimulai dengan ketulusan niat dalam hati sanubari untuk mengikuti jalan yang benar dan mewujudkan kebaikan. Juga berarti bahwa usaha mencapai perkenan Ilahi berpangkal dari hati nurani, sebab inti sanubari ialah hati nurani. Sanubari adalah modal primordial kita yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita guna dapat secara naluriah mengetahui benar atau salah, baik dan buruk".

Lebih lanjut Cak Nur mengatakan bahwa:

"Manusia tidak mampu tampil sebagai makhluk moral, yaitu makhluk yang secara logis dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala amal perbuatannya, baik ataupun buruk, jika ia sebagai pribadi tidak

memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya. Seorang pribadi yang menjalankan tindakan dan perilakunya karena terpaksa—misalnya, karena ia hidup dalam sistem sosial-politik yang tiranik, otoriter dan menindas—bukanlah seorang yang dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya itu”.

Konsistensi Cak Nur di dalam Membela Eksistensi Khonghucu Sebagai Agama

Di depan sudah saya sampaikan mengenai alasan kesediaan Cak Nur menjadi Anggota Kehormatan MATAKIN, yang pada intinya adalah demi kemaslahatan umat Khonghucu. Hal ini ditunjukkan beliau, di dalam berbagai kesempatan membicarakan kemajemukan agama-agama di Indonesia dengan senantiasa mengikutsertakan Khonghucu. Ketika beliau hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek ke-2553 di Pekan Raya, Jakarta pada tanggal 17 Februari 2002 yang diselenggarakan MATAKIN.

Pada waktu itu, kebetulan beliau duduk di sebelah Kwik Kian Gie. Perayaan Tahun Baru Imlek ke-2553, tahun 2002 tersebut merupakan peristiwa yang bersejarah bagi umat Khonghucu khususnya, dan bagi bangsa Indonesia umumnya atau siapa saja yang merayakan Tahun Baru Imlek. Presiden Megawati pada waktu itu mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai HARI LIBUR NASIONAL. Di dalam suasana kegembiraan tersebut, pak Kwik Kian Gie terlibat

perbincangan dengan Cak Nur. Di dalam perbincangan tersebut, sempat terlontar ucapan Pak Kwik, bahwa Khonghucu sesungguhnya bukan agama, tetapi filsafat belaka. Nah, mendengar pernyataan tersebut dengan serta-merta Cak Nur tidak dapat menerimanya dan langsung memberikan penjelasan panjang lebar untuk ‘membela’ eksistensi Konghucu sebagai agama.

Teladan Sebagai Pendidik

Sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulya, Cak Nur juga telah menunjukkan identitas kebangsaannya dengan membuat terobosan, contoh kecil yang saya amati adalah pada waktu acara wisuda di Universitas Paramadina Mulya, Cak Nur tampil beda dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Prosesi wisuda diikuti dengan musik, yakni gamelan Jawa dan pakaian yang para anggota Senat Perguruan Tinggi Paramadina Mulya adalah stelan jas, tidak memakai toga ‘kebesaran’ .

Ketika memasuki ruangan upacara, bahkan para tamu undangan tidak diminta untuk berdiri untuk menghormati prosesi Senat. Komprominya, para lulusan tetap menggunakan toga, tidak jas. Hal ini membekas dalam ingatan saya, betapa sesungguhnya menunjukkan Cak Nur tidak suka yang formalitas, dan tidak “gila hormat”, sekaligus menunjukkan beliau orang yang rendah hati, sederhana, egaliter. Semoga lulusan Universitas Paramadina Mulya dapat meniru karakter Cak Nur.

Perjumpaan Akhir dan Harapan

Saya bersyukur ketika beliau terbaring di rumah sakit di *National University Hospital (NUH)*, Singapore masih berkesempatan mengunjungi beliau, yaitu satu hari sebelum terjadinya bencana Tsunami di Aceh dan berbagai belahan dunia, tepatnya pada hari Natal, 25 Desember 2004. Ketika itu Cak Nur dalam keadaan sadar, dan sudah bisa bicara, walaupun pelan. Ketika datang mengunjungi beliau di salah satu ruangan di NUH, Singapore, saya disambut istri Cak Nur, Mbak Omi, dan Cak Nur yang terbaring, penuh senyum.

Pada waktu itu saya banyak bercerita tentang situasi di Tanah Air kepada beliau. Di tengah-tengah pembicaraan suster rumah sakit masuk mengingatkan tentang obat yang mesti dimakan siang itu, dan hebatnya sang suster menanyakan ke Cak Nur tentang alternatif pilihan obat yang sebaiknya Cak Nur makan. Sayang sekali pada waktu Cak Nur dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Pencipta pada tanggal 29 Agustus 2005 untuk selama-lamanya saya lagi tidak sedang berada di Jakarta, sehingga tidak mempunyai kesempatan menyampaikan penghormatan terakhir untuk beliau yang saya kagumi dan hormati, semoga tulisan ini menjadi kenang-kenangan bagi saya dan keluarga, khususnya Mbak Omi, bahwa Cak Nur juga telah memberikan jasanya kepada kami, umat Khonghucu di Indonesia di dalam proses perjuangan kami untuk dihormati hak asasi manusia-nya, khususnya di dalam mendapatkan kembali hak-hak asasi kami yang terpinggirkan.

Saya yakin, beliau ikut berbahagia mengetahui, kini umat Khonghucu Indonesia telah bebas dari perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah, terhitung tanggal 24 Januari 2006 telah dilayani sebagai umat agama Khonghucu di Departemen Agama, dan terhitung tanggal 24 Februari 2006 umat Khonghucu secara *de jure* telah diperbolehkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk mencantumkan identitas Agama Khonghucu di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, serta pasangan yang beragama Khonghucu telah diterima dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil perkawinannya.

Terima kasih Cak Nur, kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memaafkan dosa dan kesalahan yang mungkin diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja selama hidup di dunia ini, dan memberikan tempat yang amat layak bagi kehidupan arwah almarhum di sisiNya. Semoga Program Studi Islam Paramadina yang pernah dirintis Cak Nur dapat diteruskan oleh rekan-rekan Cak Nur sehingga Islam dapat dipahami hakikatnya sebagai ajaran tentang semangat Ketuhanan dan kemanusiaan yang sangat tinggi, sehingga persaudaraan antar umat beragama dan berkepercayaan di Indonesia dapat berlangsung penuh kehangatan, damai dan sejahtera, sehingga dapat memotivasi agar kita berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama manusia.

**CAK NUR:
BUKTI KEPEDULIAN ALLAH TERHADAP BANGSA INDONESIA**

Oleh: Anand Krishna*

Oleh karena itu, saat saya mendengar berita tentang “kepergian”-mu, kukatakan: “Tidak, seorang Cak Nur tidak bisa mati. Tidak mungkin mati. Karena, Nurcholish bukanlah sekedar nama seseorang. Nurcholish bukanlah sekedar gumpalan darah, daging dan tulang-belulang..... Nurcholish adalah sebuah Ideal. Suatu Visi. Sebuah Misi..... Nurcholish adalah sebuah Falsafah, bukan sekedar filsafat yang kering.... Ia adalah Pedoman Hidup. Nurcholish adalah Cahaya Sejati, Cahaya Ilahi, Cahaya Murni yang senantiasa menerangi jiwa manusia..... Ia adalah Bukti Kepedulian Sang Maha Cipta terhadap segala yang tercipta atas Kehendak-Nya pula!”

Beberapa hari setelah kau pulang dari Cina, aku beserta teman-teman menemuimu di rumah sakit..... Mba’ Omi, pendampingmu, setia menemanimu.... Saat itu, kukatakan kepadamu: “Cak,” dan aku masih ingat betul, kutambahkan pula, “Bapak, kita masih membutuhkan Bapak. Bangsa ini masih membutuhkan Bapak.”

Saat itu, kau tersenyum dan kau katakan, “Ya, ya, ya.....”

“Ya” yang terucap olehmu saat itu, kuterima sebagai jaminan Allah akan kepedulian-Nya. Jaminan yang disampaikan-Nya “lewat”-mu, Cak.

Cak, kau memang tampak lelah, letih.

Kau memang butuh istirahat..... kusampaikan pula hal yang sama kepada teman-temanku, “Cak Nur butuh istirahat.... tetapi, sebelumnya, mari kita doa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing.”

Maka, berdoalah rombongan kita untuk mensyukuri kehadiranmu di tengah-tengah bangsa yang sedang bergejolak emosinya. Mereka berdoa sesuai dengan agama, sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Doa mereka berasal dari tradisi yang berlainan. Dibacakan dalam bahasa yang berbeda-beda pula. Namun semangat “mensyukuri” dan “memberkati” dibalik setiap doa terasa pula olehmu. Maka, kau tersenyum!

Ya, Cak, kau tersenyum.

Kau memahami betul bahwa **Al Fatihah** membuka Jalan bagi Berkah.... bahwa **Doa Bapak Kami** memberi kita Semangat untuk Berjalan..... bahwa **Buddham Sharanam Gatchaami** adalah Bekal Pemberdayaan Diri yang dibutuhkan dalam perjalanan..... dan, terakhir, **Gayatri** adalah Permohonan kepada Sang Keberadaan untuk senantiasa menyertai kita dalam perjalanan ini.

Kau memahami betul, Cak, bahwa ada benang merah yang mengikat seluruh umat manusia, yang mempertemukan mereka semua..... Pemahamanmu Cak, kesadaranmu Cak, dan pengamalanmu terhadap pemahaman dan kesadaran itu, semangatmu – tidak bisa mati.

Cak, kepergianmu untuk sesaat ini hanyalah untuk menyegarkan jiwamu yang lelah.... Aku dapat memahami hal itu. Kau memang capek, sudah capek sekali. Kau membutuhkan istirahat ini.

Sementara itu, Cak..... pekerjaanmu tak akan berhenti. Para pekerja di lapangan sudah siap. Siap untuk menerima beban yang selama ini kau tanggung diatas kedua pundakmu. Memang, para pekerja di lapangan, kita semua, tidak semampu dirimu. Kemampuan kita terbatas. Beban yang kau pikul sendiri, terpaksa harus dipikul oleh beberapa orang. Tetapi, tak apa, Cak. Dengan cara ini, kau telah menghidupkan kembali Semangat Gotong Royong dalam diri Manusia Indonesia.

Impianmu akan “Indonesia Kita” telah menjadi kenyataan.

Ya, “telah”.... bukan “akan”..... Mimpiimu telah terwujud. Berbagai macam peraturan dan undang-undang yang dapat meruntuhkan Bangunan Indonesia Kita, sudah mulai ditentang ramai-ramai oleh Manusia Indonesia.

Manusia Indonesia sudah sadar bahwa apa yang selama ini digembar-gemborkan sebagai ajaran agama, ternyata hanyalah suatu paham yang sempit. Ajaran Agama selalu luas dan meluaskan. Ajaran Agama tidak pernah sempit.

Manusia Indonesia sudah tersadarkan bahwa ia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Satu Umat Manusia.... Ya, persis seperti yang tertulis dalam kitab-kitab suci kita..... Satu Umat, Satu Keluarga Besar..... Dan, senasib, sama-sama ditakdirkan sebagai Khalifah diatas muka bumi ini.

Manusia Indonesia telah melihat Wajah Allah yang berada di Timur dan di Barat, di Utara dan di Selatan, dimana-mana. Manusia Indonesia menyadari betul bahwa Ia meliputi segalanya. Wilayah Kekuasaan-Nya adalah seluruh alam semesta, Luas, Tak Terbatas..... *and yet*, Ia juga bersemayam dalam diri setiap makhluk..... lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Ia *Transcendent*, sekaligus *Immanent*. Meliputi segalanya, namun berada dalam segala sesuatu. Hal ini tentu tidak dapat dilogikakan, karena bukan sebuah konsep. Tidak dapat diperdebatkan, karena bukan filsafat. Tidak bisa dibantah dan tidak perlu didukung, karena bukan ilmu. Hal ini menyangkut kesadaran manusia, pengalaman individu. Berkat pencerahan yang kau berikan, Cak, Manusia Indonesia telah mengalami hal ini.

Dengan sekian banyak bekal yang telah kau berikan kepada Manusia Indonesia, tidaklah berlebihan bila Manusia Indonesia merasa mampu melanjutkan perjuanganmu.

Melanjutkan pekerjaanmu. Ya, kami, aku, kita semua, berjanji akan melanjutkan misimu.

Selama ini kau bekerja di lapangan terbuka, kau berada di ruang publik – maka gampang untuk melihatmu. Mudah untuk mencium tanganmu. Sekarang kau beristirahat di dalam kamarmu. Kepergianmu kumaknai seperti itu saja. Maka, walau kau sedang beristirahat dalam kamar – jiwamu, semangatmu tetap saja kurasakan di lapangan terbuka, di setiap ruang publik!

Bebas dari keterbatasan jasmani, sekarang jiwamu dapat menyapa siapa saja. Semangatmu dapat memberi inspirasi kepada siapa saja. Kau, Cak Nur, telah menjadi milik seluruh bangsa.

Mereka yang berseberangan denganmu pun akan dikenang oleh bangsaku hanya karena mereka berseberangan denganmu. Berkah yang mereka peroleh dari kehadiranmu, sebatas itu saja. Kukasihani mereka. Tapi, apa boleh buat. Itulah takdir mereka.

Cak, banyak yang telah kau berikan kepada bangsa ini..... kau adalah seorang pemberi. Sementara ini kita hanya menerima, dan menerima, dan menerima. Apa yang dapat kuberikan kepadamu atas nama bangsaku?

Barangkali, hanyalah sebuah tekad: Tekad untuk berjuang terus guna mempertahankan Bangunan Indonesia Kita, impianmu yang telah menjadi kenyataan.

Bila tersisa setetes pun darah dalam raga ini, hingga titik penghabisan, Cak – bangunan yang telah kau dirikan ini akan kujaga, kurawat, kupertahankan.

Nyawa boleh melayang, jiwaku akan bergabung denganmu Cak, untuk melanjutkan perjuangan kita bersama.... Indonesia tidak boleh terpecah-belah. Indonesia Satu dan tetap Satu. Indonesia Jaya, Tetap Jaya, Selalu Jaya..... Indonesia sebagai bagian dari Mimpi kita yang lebih Besar lagi, Cak: Satu Bumi, Satu Langit, dan Satu Umat Manusia!

Salam Indonesia, Cak.....

Selamat Beristirahat!

** Humanis, Penulis, Penggagas “Gerakan Integrasi Nasional” (National Integration Movement) dan Pendiri “Pusat Kesehatan Holistik dan Meditasi Anand Ashram”.*

CAK NUR YANG SAYA KENAL

Oleh: Sri Urip

Jakarta, 7 Mei 2006.

Saya merasa beruntung, bahwa saya masih dapat mengenal Cak Nur, walaupun hanya sebentar yaitu selama kurang lebih 4-5 tahun, sebelum Cak Nur meninggalkan kita untuk selama-lamanya.

Saya sangat terkesan dengan kepribadian Cak Nur yang kelihatannya sangat lemah lembut, tetapi dibalik kelembutannya beliau adalah seorang yang mempunyai pendirian yang tegas dan mempunyai komitmen tinggi mengenai segala macam yang ada hubungannya dengan “Good Governance”

Pertama saya bertemu Cak Nur adalah pada waktu saya menjabat sebagai Executive Director dari Partnership for Governance Reform, dan Cak Nur adalah Joint Chairperson dari Governing Board bersama –sama dengan Ibu Erna Witular.

Partnership adalah organisasi yang pertama di Indonesia yang mencanangkan dan mendukung Reformasi di segala bidang serta Anti-KKN dan pada waktu itu kami berpendapat untuk mensosialisasikan hal tersebut juru bicara

yang tepat adalah Cak Nur yang sudah menjadi panutan / penasehat bangsa dalam banyak hal termasuk nilai-nilai “Good Governance”, untuk ber-sama-sama dengan tim Partnership men-sosialisasikan Good Governance / Reformasi dengan melakukan roadshow ke daerah- daerah.

Surat pertama yang saya kirimkan kepada Cak Nur- sebelum bertemu dengan beliau- dibalas Cak Nur dengan surat dalam bahasa daerah “Jawa” tingkat tinggi. Suratnya menyatakan penolakan, karena Cak Nur merasa bahwa dengan jalan melakukan roadshow dan berbicara di daerah – dimana- mana di Indonesia seolah-olah sepertinya Cak Nur ingin menjadi terkenal dengan menggalang popularitas lewat ceramah Good Governance – Beliau tidak menyadari bahwa Cak Nur sudah terkenal sebagai “seorang pribadi tanpa pamrih”, jadi tidak perlu cemas dikatakan bahwa ingin menjadi lebih terkenal lagi.-

Penolakan tadi dilakukan dengan halus sekali, yaitu dengan surat berbahasa Jawa “kromo inggil”, sehingga orang tidak akan merasakannya. Saya merasa beruntung bahwa meskipun saya sudah tinggal di Jakarta sejak th.1960, tetapi bahasa Jawa kromo inggil masih tetap saya gunakan, sehingga dapat memahami makna surat tersebut.

Akhirnya kami putuskan untuk saya sendiri menghadap Cak Nur untuk membicarakan kesediaan beliau untuk atas nama Partnership beserta tim berkeliling di Indonesia untuk mensosialisasikan “Good Governance.

Kunjungan yang sedianya dijadwalkan selama setengah jam menjadi lebih dari satu jam. Ternyata kami mempunyai banyak persamaan dalam hal kesadaran betapa pentingnya Good Governance, apakah itu di Perusahaan Multinasional (seperti yang telah dilakukan PT Unilever Indonesia, dimana saya baru saja meninggalkannya sesudah berkarya selama 30 tahun – pada waktu itu saya baru saja pensiun dari jabatan terakhir saya sebagai CEO / Presiden Direktur-), maupun di semua bagian dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mengangkat kita semua dari krisis ekonomi di Indonesia. .

Setelah kami berhasil memastikan Cak Nur, bahwa hanya pribadi seperti Cak Nur yang netral / tidak berpartai dan dipercaya oleh bangsa Indonesia dapat meluncurkan suatu keyakinan baru yaitu betapa pentingnya Reformasi /Anti-KKN, bila bangsa Indonesia ingin bangkit kembali dari keterpurukan yang kita alami, maka roadshow Cak Nur bersama tim Partnership dilakukan dikota-kota Medan, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar dll.

Dalam banyak hal saya merasa belajar banyak selama mendampingi Cak Nur dan Ibu Omi.

Jelas bahwa Cak Nur mempunyai pengetahuan yang luas mengenai nilai-nilai Good Governance yang dilandasi transparansi, accountability, responsibility, competence / integrity serta leadership. Cak Nur bukanlah pemberi ceramah yang meletup-letup, tetapi selalu tenang dan jelas disertai

contoh-contoh sedemikian sehingga membuat orang yang mendengar yakin dan percaya. Kepribadian Cak Nur yang tanpa pamrih dan sangat “genuine” ingin memberi kontribusi pada reformasi yang sangat diperlukan Indonesia sangat dirasakan oleh pendengar-pendengar ceramah Cak Nur.

Bukti bahwa Cak Nur tidak memilih masuk didalam salah satu Partai Politik, - meskipun hampir semua partai menginginkan Cak Nur menjadi salah satu Pimpinannya-, menunjukkan bahwa Cak Nur adalah sangat netral dan hanya memikirkan untuk kebaikan dan kemakmuran NKRI beserta seluruh rakyatnya.

Oleh karena itu, banyak yang menginginkan untuk Cak Nur mencalonkan diri menjadi Presiden, karena banyak yang masih memimpikan mempunyai Presiden yang betul-betul tidak mempunyai agenda yang tersembunyi dan sangat fokus dalam mengembangkan kemajuan dan men-sejahterakan Negara dan Rakyat dengan memegang teguh prinsip “Good Governance” dan “Transparancy” dan yang paling penting tidak harus mendasarkan Strategy Pemerintahan berdasarkan komitmen tersembunyi pendukung.

Sekarang terbukti banyak sekali yang sudah dapat melewati “Fit and Proper test” yaitu tidak sedikitpun melakukan KKN pada posisi sebelumnya, tetapi sesudah menduduki posisi baru yang lebih tinggi /vital, cepat berubah dan tidak dapat menjaga diri untuk mempertahankan prinsip

“Good Governance”, langsung mengikuti arus KKN yang memang sampai sekarang masih sangat kuat pengaruhnya, meskipun terhadap pribadi yang tadinya sangat bersih pun.

Kita semua tahu bahwa uang masih sangat berperan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, apakah itu di Amerika ataupun di Indonesia. Oleh karena itu meskipun didukung oleh PMKI serta banyak pengagum beliau, Cak Nur tidak berhasil mencapai tahap yang lebih menentukan dalam pemilihan Presiden yang lalu.

Sekarang Cak Nur telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kadang-kadang saya berpikir kalau sedang banyak demo memprotes kebijakan pemerintah, bila saja Cak Nur masih ada, kemungkinan masukan- masukan dari Cak Nur kepada Pemerintah, akan dapat mendingin suasana yang tegang dan mengurangi demo-demo ketidakpuasan Rakyat atas kebijakan Pemerintah.

Sri Urip, Mantan Chairman /CEO PT Unilever Indonesia. (Bekerja di PT Unilever Indonesia selama 30 tahun); Mantan Executive Director Partnership for Governance Reform for Indonesia; Mantan anggota Ombudsman Nasional; Founder member dari ISICOM (Indonesian Association of Commissioners); Komisaris Independen dari PT Sepatu Bata, PT Multi Bintang, PT Dynaplast, Ketua Komite Audit dari PT Dynaplast.

REVOLUSI NURCHOLISH MADJID

By R. William Liddle

Buat banyak Muslim Indonesia, dunia mereka berubah sejak tanggal 2 Januari 1970. Di hari itu Nurcholish Madjid, yang menjabat sebagai ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, menyentak hadirin, sekumpulan anak muda Muslim modernis yang berpendidikan Barat, melalui sebuah pidatonya yang menuntut liberalisasi, sekularisasi, kebebasan intelektual, 'the idea of progress' (gagasan kemajuan) dan keterbukaan, termasuk pembentukan sebuah kelompok pembaharu yang berhaluan liberal.

Islam Indonesia, menurut Nurcholish, telah kehilangan kemampuannya sebagai "psychological striking force." Ketika itu, jumlah Muslim-taat berkali lipat lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya, khususnya setelah kekalahan komunis pada pertengahan 60-an. Namun, tidaklah jelas faktor agama apa yang menjadi penariknya.

"Kecuali sedikit saja, sudah terang mereka sama sekali tidak tertarik kepada partai-partai/organisasi-organisasi Islam. Sehingga perumusan sikap mereka kira-kira berbunyi: Islam, yes, partai Islam, no! Jadi, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik.

Basis bagi sistem pemikiran yang baru, dalam pendapat Nurcholish, adalah sekularisasi. “Yang dimaksudkan dengan sekularisasi ialah setiap bentuk *liberating development*. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islami itu, mana yang transendental dan mana yang temporal. Malahan, hirarki nilai itu sendiri sering terbalik, transendental semuanya. Sekularisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-*ukhrawi*-kannya.

”Lebih lanjut, sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai ‘khalifah Allah di bumi.’ Fungsi sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan hidupnya di atas bumi ini, dan sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya tanggung jawab manusia atas perbuatan-perbuatan itu di hadapan Tuhan.”

“Sekarang, perjuangan memperbaiki nasib umat manusia, bukanlah menjadi monopoli umat Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi ijtihad dan pembaruan yang berarti, jika kita tidak mempunyai organisasi-organisasi penelitian dengan dasar yang kuat, jika kita tidak mempunyai metode yang unggul untuk menganalisis situasi apa pun, dan jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang tepat tentang perkembangan-perkembangan kemajuan kemanusiaan dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh penemuan-

penemuan baru di setiap bidang, baik sosial maupun alam. Maka tanggungjawab kaum terpelajar sungguh besar dan berat, di hadapan umat manusia dalam sejarah ini, dan di hadapan Tuhan kelak di kemudian hari (di akhirat).”

Sulit untuk melebih-lebihkan dampak negatif atau positif dari pidato Nurcholish ini di masa itu, maupun daya gelora dan inspirasinya yang terus berlanjut sampai sekarang. Buat para politisi dan intelektual eks-Masyumi di awal era Orde Baru, khususnya bagi para pengikut Mohammad Natsir yang karismatik, yang untuk sementara sedang melanjutkan perjuangan mereka di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), pidato ini adalah suatu penolakan total terhadap perpolitikan masa lalu mereka dan strategi mereka ketika itu untuk kembali ke dunia politik.

Mereka menyerang Nurcholish bahwa dia telah salah menafsirkan (Islam tidak membolehkan segala bentuk sekularisasi, begitu kata mereka) dan bahwa dia punya motif terselubung (terang dia adalah seorang oportunis penjiilat Soeharto, demikian mereka mencercanya). Padahal, Nurcholish pernah dijuluki Natsir muda, yang membuat kemurtadannya itu (sebagaimana dituduhkan mereka) jadi makin terasa mengusik.

Boleh jadi, lebih banyak kalangan Muslim modernis, khususnya di antara kaum muda urban yang berpendidikan Barat, yang bersetuju, ketimbang yang mencaci-maki, pidato Nurcholish. Buah pemikirannya tetap populer selama lebih tiga dasa warsa kemudian hingga di penghujung hayatnya,

meski tentu saja, ada juga yang masih mengecamnya, khususnya mereka yang datang dari kelompok Islamis sekarang ini.

Bagaimana menjelaskan popularitas Nurcholish yang tak lekang oleh zaman itu?

Di mata saya, itu karena gagasannya tentang Islam dan politik, atau lebih luas lagi antara Islam dan masyarakat, pas dengan masa dan tempatnya berpijak, Indonesia di masa awal modernisasinya. Formulasi gagasannya itu klop dengan kebutuhan sekuler maupun religius dari suatu kelompok besar yang sedang tumbuh—kaum Muslim urban modernis yang berpendidikan Barat. Dengan kata lain: Nurcholish membuka ruang intelektual dan emosional di mana banyak orang di generasinya bisa memperbaharui keimanan Islam mereka.

Kebutuhan sekuler dari kelompok ini adalah kebutuhan akan ideologi yang bisa menyokong partisipasi penuh mereka dalam kehidupan urban di abad kedua puluh. Kebutuhan religius mereka adalah kebutuhan akan penafsiran Islam yang bisa memuaskan secara rohani sekaligus masih bersesuaian dengan pemahaman keimanan mereka sebelumnya. Kala itu, sudut pandang dominan, atau nyaris semua, kaum Muslim modernis, adalah bahwa masjid dan Negara tak terpisahkan, dan bahwa semua kebenaran religius akan ditemukan dalam Qur'an dan Hadits Nabi.

Rumusan Nurcholish—yang buat banyak orang sungguh memeranjatkan—memungkinkan mereka bisa membayangkan diri mereka sebagai Muslim yang saleh,

sekaligus sebagai warga yang baik dari Indonesia yang modern. Senyampang kian meluasnya kelompok ini, tidak kelewat sulit untuk meramalkan bahwa gagasan Nurcholish, paling tidak, akan terus bergema di abad ini.

R. William Liddle, profesor ilmu politik, The Ohio State University.

CAK NUR: MAN OF IDEAS

Oleh: Mar'ie Muhammad

Cak Nur, sosok yang tidak selalu berterus terang dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dia terlalu berterus terang dalam mengemukakan gagasan dan ide-idenya. Disini terletak ciri utama dari seorang intelektual. Intelegensi dan intelektualitasnya, saya kenal sejak berinteraksi dalam lingkungan HMI. Sewaktu saya menjabat sebagai Sekjen HMI tahun 1960-an, Cak Nur menjabat Ketua HMI Cabang Ciputat. Gagasan, pikiran dan ide Cak Nur tidak hanya terbatas pada masalah-masalah Islam, tapi lebih luas dari itu. Potensi dan modal intelektualitasnya berakar dari latar belakang pendidikan dalam dan luar negeri, serta pergaulan yang amat luas dengan berbagai kalangan.

Cak Nur menempuh pendidikan di pesantren tradisional Jombang (Darul 'Ulum) serta pesantren yang biasa diberi predikat modern, Gontor. Ia mengenyam pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari Jombang, Ponorogo, Jakarta lalu melanjutkan ke University of Chicago, Illinois, USA dan menamatkan pendidikannya hingga memperoleh PhD tahun 1984. Sejak saya mengenalnya dalam berbagai diskusi yang cukup mendalam, Cak Nur sangat gemar bicara soal politik dalam arti luas. Ia gemar menyentuh arena etika politik, hubungan agama dan negara, hingga bagaimana merajut dan mempersatukan berbagai kelompok dan keyakinan yang

berbeda dalam suatu kontrak sosial dan politik. Karenanya Cak Nur gemar dengan pikiran-pikiran yang pluralis dan referensi utama yang selalu digunakan adalah Perjanjian Madinah, yang justeru digagas dan diterapkan secara konsisten oleh Nabi Muhammad SAW dengan pihak-pihak non-muslim yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ucapan Cak Nur yang sangat berani dengan slogan: Islam Yes, Partai Islam No, tentu mengundang berbagai kontroversi, kritikan hingga hujatan. Lebih dari itu, sewaktu menjabat sebagai Ketua Umum HMI (dua periode), Cak Nur melontarkan gagasan tentang sekularisme, sungguh Cak Nur telah memasuki daerah beranjan.

Pemikiran-pemikiran ini telah ia lontarkan jauh sebelum melanglang buana menuntut ilmu di Chicago. Pemikiran ini adalah hasil renungan yang original dan bukan pengaruh dari Amerika Serikat seperti yang dituduhkan kepadanya. Terlepas setuju atau tidak dengan pemikirannya, Cak Nur tidak perlu diragukan sebagai tokoh pembuka jalan kejenuhan dan kedangkalan pemikiran-pemikiran Islam, termasuk dikalangan tokoh-tokoh Islam sendiri. Pikiran-pikiran yang orisinal dan disampaikan secara jujur dan blak-blakan, tentu akan mengundang berbagai kontroversi. Jangan lupa, kejayaan Islam setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin dipicu oleh keberanian menyerap dan mengartikulasi serta menerapkan berbagai pemikiran dan ilmu dari Yunani, Romawi, Mesir dan Persia . Bukankah Islam mengajarkan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi camkan apa yang disampaikan. Jadi ajaran Islam yang sebenarnya, menolak setiap bentuk

apriorisme dan sungguh Islam merupakan ajaran yang memberi tempat seluas-luasnya bagi pluralisme, jadi tidak hanya pluralistis sebagai pendekatan.

Islam pula mengajarkan hubungan langsung dengan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Al-Khalik. Islam tidak mengenal, bahkan melarang hierarki keagamaan atau kerabian. Jadi Islam tidak mengenal perwakilan Allah di atas bumi. Setiap manusia berfungsi sebagai khalifah di atas bumi guna menjaga dan memakmurkan dan bukan merusak alam semesta dengan berpegang pada Sunnatullah. Tidak satupun lembaga atau orang atau kelompok orang yang mempunyai hegemoni dan legitimasi atas nama agama menafsirkan tafsir agama Islam dan kita semua harus mengikutinya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk berjihad, jika kita benar dalam berjihad, kita memperoleh dua pahala, dan jika salah kita tetap memperoleh satu pahala. Islam yang sebenarnya membuka peluang yang hampir tidak terbatas bagi semua diskursus dengan tetap berpegang pada aqidah.

Dalam etika publik, Cak Nur sangat gemar dengan tokoh Nabi Ibrahim AS yang selalu mengajarkan agar kita hidup dalam keadaan hanif dan berpasrah diri kepada Allah (Islami). Hanif yang bermakna cenderung kepada keadilan dan kebenaran. Etika publik semacam ini yang berlaku bagi keluarga, masyarakat dan terlebih lagi mereka yang menggenggam kekuasaan formal atau mereka yang diberikan

amanat. Etika semacam itu kini semakin langka, dan inilah salah satu sumber kehancuran bangsa.

Saya tidak tahu, sudah berapa banyak buku yang ditulis oleh Cak Nur termasuk buku terakhir yang ditulis oleh Almarhum, “Indonesia Kita”. Buku ini diterbitkan bulan Desember akhir 2003, buku ini semacam wasiat bagi bangsa. Dalam buku ini dikupas dari masalah nasionalisme klasik, nasionalisme modern, tentang negara bangsa, sistem pemerintahan hingga menatap ke depan untuk membangun kembali negara. Buku ini membahas pula masalah tentang korupsi serta gagasan reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan produktif dari bawah.

Dunia ekonomi tentu bukan dunia Cak Nur. Gagasan-gagasan besar telah dicetuskan oleh Cak Nur yang sebenarnya banyak merangkum seraya memutakhirkan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Untuk melaksanakan pemikiran-pemikiran, terlebih lagi yang sifatnya fundamental, harus ada mesin untuk mengimplementasikannya. Cak Nur bukan sosok tokoh yang tekun untuk mengatur administrasi. Namun, Yayasan dan Universitas Paramadina yang ia gagasi diharapkannya dapat menjadi tempat persemaian gagasan-gagasan dan pikirannya. Ia tentu berharap agar bibit-bibit pemikiran dapat ditaburkan, dipupuk dan kemudian kita tuai.

Sayangnya, Cak Nur memang bukan tokoh yang tekun dalam mengatur mesin organisasi sehingga banyak pikiran-pikirannya yang berserakan, yang tentu perlu dirajut kembali dan diambil saripatinya, agar pikiran-pikiran itu menjadi utuh

dan dapat ditindaklanjuti. Ini tidak berarti mengecilkan arti pemikiran dari putra-putra bangsa lainnya yang juga berbobot. Tak bisa dipungkiri Cak Nur adalah seorang man of ideas yang mampu menghasilkan pikiran-pikiran besar mengenai bangsa dan negara ini. Walaupun demikian, sangat jarang kita temui individu-individu yang mampu melaksanakannya. Dua hari menjelang meninggal, saya masih berkomunikasi dengan Cak Nur, inilah pertemuan terakhir sebelum Cak Nur sepenuhnya tidak sadar dan kembali ke Rahmatullah. Meskipun tidak ada kata-kata yang dia ucapkan, dipegangnya tangan saya erat-erat dan secara instingtif, saya menangkap makna dan pesannya. Pesannya kira-kira, lanjutkan apa yang kita gagas bersama dan tentu tidak untuk digagas lagi, tetapi dilaksanakan.

Cak Nur yang dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939, di Dusun Mojoanyar, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang meninggalkan kita di alam yang fana ini untuk selama-lamanya pada tanggal 29 Agustus 2005 pukul 14.15 WIB di Jakarta. Saya percaya semua karya-karyanya tetap berguna dan relevan untuk pembangunan bangsa dan saya berdoa semoga menjadi amal jariyah Almarhum di alam baka, tempat kita seluruhnya akan kembali kepada-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 3 Agustus 2006.

NURCHOLISH MADJID, INDONESIA'S NEW ORDER, AND THE RISE OF THE MUSLIM MIDDLE CLASS

By Martin van Bruinessen

Nurcholish Madjid, Indonesia's best known Muslim intellectual, died in August last year after a prolonged and painful illness. At the time of his death, the country appeared to be drifting away into increasing religious intolerance: physical attacks by radical Muslims on makeshift churches and assaults on the main centre of the Ahmadiyah movement; mob demonstrations and death threats against the Liberal Islam Network; and a series of fatwas in which Indonesia's Ulama Council, once a paragon of moderation, inveighed against 'liberal Islam,' secularism and religious pluralism, forbade inter-religious prayer meetings and reinforced earlier bans on inter-religious marriage. The days in which Nurcholish' voice of moderation and inter-religious understanding was almost hegemonic, at least in the media, are rapidly fading away, and memories of Nurcholish resonate with nostalgia for times of greater harmony.

Nurcholish' career as a public intellectual was closely correlated with the emergence and demise of Indonesia's New Order, the political system put in place by General Suharto and his advisors. He was a prominent member of the student generation of 1966, which played an active role in the demonstrations that weakened Sukarno and prepared the way for Suharto's final takeover in 1966 and many members

of which were soon to fill the ranks of the New Order's civilian elite. In that crucial year he was elected the chairman of the most important Muslim student union, HMI — a position he held for two consecutive three-year terms. A number of provocative public statements he made about the need to rethink petrified modes of Muslim thought and patterns of action in the name of Islam received wide press coverage and gave him the reputation of chief legitimiser of the New Order's policies towards Islam.

His statements could be, and were, read as a devastating critique of the existing Muslim parties and organisations, their obsession with the ideal of an Islamic state, and the general staleness of their religious ideas. A comment he made on secularisation as the 'de-sacralisation' of concepts and institutions that had been turned into sacred objects by the Muslim community was misread as a call for secularism. This all went down well with the regime, which was bent on depoliticising society and destroying the political muscle of Islam, but it earned Nurcholish the lasting enmity of many of the older generation of Muslim political leaders — especially those of the Masyumi party, who had been jailed or pushed into the political margin by Sukarno and were never rehabilitated under Suharto.

In the final days of Suharto's rule, when the president made a last-ditch attempt to form a new cabinet in response to the ever louder protests and calls for reform and invited nine Muslim leaders to give him advice, Nurcholish was the only one who had the courage to tell Suharto in polite words

that those calls for reform meant that the people wanted him to step down. The new cabinet fell through because some key ministers deserted; Suharto desisted from another attempt and resigned, handing over the presidency to his deputy, B.J. Habibie. This was the other side of Nurcholish' position as New Order legitimiser: he could withhold legitimisation, as he had been one of the few who could exercise the moderate criticism of a loyal but independent supporter of the regime. Unlike many others, including some who once had been vocal critics, Nurcholish never lost his independence.

The impact of Nurcholish' thought on the ideas and attitudes of the educated members of his own generation and the generations following can hardly be overestimated. At a time of rapid economic and social change, he argued for a rational and dynamic interpretation of Islam, in which change and development are natural processes and God is the only unchangeable Truth. The essence of Islam is submission to God; established practices and received ideas should not be made into sacred icons, for that would be tantamount to *shirk*.

Nurcholish also imparted upon his followers a taste for wide-ranging and eclectic reading. In his numerous lectures and papers, quotations of Quranic verses and references to American sociologists and such thinkers as Bertrand Russell and Jean-Paul Sartre stand side by side. Doctoral studies at the University of Chicago during 1978-84, under Leonard Binder and Fazlur Rahman, further broadened his horizon. He wrote his dissertation on reason and revelation in the thought of Ibn Taymiya, the thinker most venerated by the Islamists who

were his opponents at home, and his first major public statement upon return was a collection of translations of Muslim philosophical thinkers, from Kindi and Farabi to Afghani and Abduh, with a lengthy introduction on the intellectual heritage of Islam.

Nurcholish saw himself, and wished to be seen, as standing in a reform-minded and philosophically oriented Muslim intellectual tradition, and he was anxious to point out the genealogy of the ideas for which some of the old Masyumi leaders branded him a heretic. During his years in Chicago, he entered into correspondence with another Masyumi leader, the moderate Mohammad Roem, to explain his ideas in a form acceptable to the older man, and he made sure copies of this correspondence were – against Mom's wishes – widely disseminated. Roem was famous as one of the men who had negotiated Indonesia's independence, a former minister in several cabinets, and a Masyumi politician who had always had excellent relations with secular nationalists; recognition by Roem was very important to Nurcholish, for it gave him, as it were, a legitimate pedigree in Indonesia's Islamic movement and pointed to a respected earlier case of Muslim accommodation with secular nationalism.

For Nurcholish, there was no contradiction between devotion to Islam and nationalism. Throughout his career he frequently made the argument, in one form or another, that the Indonesian nation owed its existence to Islam, for it had been Muslim rulers who had led the struggle against colonial occupation, and Muslim traders who united the archipelago

through their trading networks and their lingua franca, Malay. The only art forms that were all-Indonesian and not specific to a single ethnic group are those associated with Islam, such as the musical *qasidah* and *dangdut* genres, with their Arab and Indian Ocean influences. One senses in Nurcholish' understanding of 'Indonesian-ness' the influence of Marshall Hodgson's concept of 'Islamicate' civilisation, with which he became acquainted during his stay in Chicago. Christians, Hindus and Buddhists are equal citizens in Nurcholish' view of Indonesian society, but Islam provides the overarching civilisational unity.

The New Order regime, incidentally, emphasised that it was the state ideology of Pancasila that united the nation in all its ethnic and religious diversity. Pancasila stood for racial, religious and class harmony; it could be accommodated with Islamic values — some even claimed it was essentially Islamic — but it was incompatible with the idea of an Islamic state. The mid-1980s were a period of confrontation, occasionally violent, between the regime and its radical Muslim critics over Pancasila, which the latter saw as a pagan philosophy in the service of non-Muslim interests.

Nurcholish was one of the first Muslim public personalities to openly endorse the government's Pancasila policy, and he was, as could be expected, taken to task for it by his old critics. At a high-profile international conference on Islamic studies in Jakarta in 1985, where one American Muslim participant caused much embarrassment by asking what 'this business about Pancasila' was, and the Indonesians were at a

loss for words (dozens and possibly even hundreds of demonstrators had been killed the army in a protest action the previous year), Fazlur Rahman came to Nurcholish' support and said that perhaps Pancasila should be seen as the Indonesian *tafsir* (exegesis) of Islam — a response that visibly made Nurcholish very happy.

Tense relations between Muslims and the Christian minority constituted an important but mostly hidden backdrop to the history of the New Order, occasionally erupting in riots and attacks on churches but soon submerged again, until violent power struggles became a dominant part of the political scene after the fall of Suharto. Christians had long been overrepresented in business, the bureaucracy and the armed forces, partly due to the superior education they owed to Dutch colonial rule and missionary schools. Muslim leaders, especially the old Masyumi politicians, were obsessed by perceived Christian efforts to undermine the Muslim *umma*, to convert nominal Muslims and to expand their control of key positions in the state apparatus through a conspiracy of businessmen, military officers and foreign sponsors. Against that background Nurcholish' friendly relations with (at least some of) his Christian peers and his consistent defence of the thesis that Jews and Christians are the Muslims' brothers-in-faith and that in several passages the Qur'an subsumes them under the label of Muslims represented a major departure from the apologetic or hostile attitudes of earlier reformist Muslim leaders. Along with the traditionalist leader Abdurrahman Wahid, who was to become

an even more committed defender of the rights of religious minorities, Nurcholish was an effective builder of bridges between religious communities: between Muslims and Christians, but with Hindus and Buddhists (who, he insisted, should also be considered as *ahl al-kitab*, 'People of the Book').

He did share the elder leaders' concern about the intentions of some Christian leaders, however, and was wary of being used as a legitimiser of efforts to spread Christianity and to weaken Islam. In the *Monitor* affair, he responded furiously to what he believed was a deliberate insult to Islam. The popular magazine *Monitor*, published by Indonesia's largest, Catholic-owned, press conglomerate, printed in its October 1990 issue the results of a popularity poll that showed the Prophet Muhammad ranking number 11 among the persons most admired by the magazine's readers.

All others were living persons, number one unsurprisingly being president Suharto (it would of course have been unthinkable for *Monitor* to show Suharto in any other position). Politicians, a pop singer, a general, Saddam Hussein, and the magazine's editor outranked the Prophet. Muslim radicals, who had long nurtured grievances against the Christian domination of the press, jumped to the occasion and organised angry and violent demonstrations against the magazine's offices. The affair appeared to unite moderates and radicals in shared indignation. When the leading daily of the same group tried to have Nurcholish make a conciliatory statement to deflate the issue, he felt he was being used and

became outraged. He made some uncharacteristically harsh comments on the issue in those days; it was left to Abdurrahman Wahid to try to calm down the situation and remind his fellow Muslims that the Prophet had given the example of patience and forgiving in the face of insults.

Years later, the affair still appeared to be on his mind when he spoke (at a conference on Islam in the 21st century, held in Leiden in 1996) of the religious tensions facing Indonesia. He spoke of Christian efforts to spread their religion and keep the Muslims in their subjugated position, and of Muslim tolerance that went unanswered; he seemed to have adopted the perceptions of the Masyumi leaders in the early years of the New Order. These tensions remained present and boded ill for the future, he said, but for one favourable factor: the government's development policies and the educational revolution, which benefited especially the relatively underprivileged Muslim masses.

Young educated Muslims of Nurcholish' generation were in fact among the main beneficiaries of the rapid economic growth and expansion of education during the New Order period. They were around when new opportunities opened up in business and the professions, in politics and the bureaucracy. The peer network of HMI alumni moreover provided strong mutual support, and the entire cohort experienced unprecedented social mobility, which enabled them to facilitate the same process for younger HMI members and alumni. By the mid 1980s, people became aware that a Muslim middle class has come into existence: Muslim in

cultural background and self-identification, middle class in economic position and taste for consumption. A large proportion of this new Muslim middle class had been HMI members, and many looked up to Nurcholish as the thinker who best embodied Muslim modernity.

Nurcholish returned from Chicago convinced that a strong middle class was a necessary condition for democratisation, and from that time on his efforts appeared to be focussed on educating and Islamising the Indonesian middle class. Aided by friends of his HMI days who were experienced organisers and others who were economically successful, he set up a sophisticated 'religious studies club' named Paramadina, which was to disseminate 'inclusive' religious thought and stimulate intellectual debate.

Paramadina provided a new type of religious sermons, or rather seminar lectures, presented in posh modern surroundings, catering to the spiritual needs and intellectual ambitions of the new Muslim middle class. The country's leading intellectuals were invited to deliver lectures at Paramadina, in tandem with a response in the form of a second lecture by Nurcholish himself and followed by a very free discussion. This was so successful that Paramadina had to gradually increase the number of lectures and offer courses on a broader range of religious subjects, among which Sufism became increasingly prominent and the positive appreciation of other religions remained a conspicuous element. Paramadina has played an important role in enriching the

intellectual content of public discourse on Islam, and it has not shied away from controversial issues.

Nurcholish continued to value his independence highly; he never accepted prestigious and well-paid official positions and, unlike many of his peers, stuck to a very modest, simple lifestyle. His prestige, however, was enormous; many former HMI activists reached high positions in politics, the media, business, education and the bureaucracy, and they kept looking towards Nurcholish for moral and intellectual guidance. The government party Golkar, which in the early 1970s was dominated by secular-minded and somewhat 'Islamophobic' bureaucrats and military officers, was gradually Islamised from inside by HMI members who worked their way up from the bottom, and by the end of the New Order period, the Islamic wing had come to dominate Golkar. In most of the new political parties established after the fall of Suharto, former HMI activists were much in evidence. In the first freely elected parliament, the number of delegates with HMI affiliation was over fifty per cent — more seats than any single party had won. In an important sense, these elections crowned the success of HMI's political ascension and of Nurcholish' project of building a strong Muslim middle class as a step towards establishing liberal democracy.

At the same time, Nurcholish continued to be the target of often fierce criticism, from the right as well as the left. Conservatives and hardliners objected strongly to his liberal religious views and his pluralistic acceptance of divergent views within Islam as well of other religions. The controversies

that had surrounded him in the beginning of his career stayed with him throughout his life. In some of the attacks on Nurcholish and his associates in the Islamist media one also senses something of a class antagonism, expressions of disgust with the lifestyle of the affluent middle class with which Nurcholish became increasingly associated. This element is more explicitly present in some of the criticism from the left, inspired by liberation theology. Early in his career, Nurcholish spoke much of social justice as a core element of Islam's message and this dimension of his thought, some young critics assert, has gradually disappeared while he was serving the middle classes. His 'bourgeois pluralism' (as one critical book is titled) engages with relations between religions but is blind to the greed and corruption of the middle class and the blatant impoverishment of the masses.

Yet in an important sense these left-wing critics also owe much to Nurcholish and continue aspects of his work. He did not establish a school of thought and did not groom favourites as successors. Rather, he stimulated many younger people to think independently and facilitated their intellectual development. Although Paramadina was 'his' forum to present his thought to a wider audience, he never imposed his own version of Islam on the younger people who came to work there and who each have their own concerns and personal spiritual and intellectual interests, often quite different from his. The role of provocative, innovative and liberating thinker and broker of ideas that he played for his own generation is now played by a highly varied group of younger men and

women, in various institutions, NGOs and informal networks. In his youth, Nurcholish was often called 'the young Natsir,' after the most influential reformist thinker of an earlier generation. It is his lasting merit that there are many 'young Nurcholishes,' none of them a clone of the original.

NURCHOLISH MAJID

By Paul Wolfowitz

I have been fortunate to have known some very remarkable people during the course of my life and career. Some of them have been quite famous and quite a few have been considered “important.” However, even among that distinguished company, Nurcholish Majid stands out as one of the most special people I have been privileged to have known.

One of the things that stands out most clearly about Nurcholish for me is his spirituality. There was a serenity and an inner tranquility that seemed to radiate from him and embraced those in his presence. He was someone who cared deeply about his fellow Indonesians, about his fellow Muslims and about his fellow human beings. One always felt that he was thinking deeply about how the world could be made a better place, not to satisfy his own ambition but because it was the right thing to do. Nurcholish taught that the essence of loving and respecting God is to love and respect the human beings who are his highest creation. That is a principle that he put into practice daily in his life.

I also remember Nurcholish for his extraordinarily deep and broad learning. He obviously knew the Koran thoroughly and could explain with detailed references the complexity of its religious and philosophical teachings. But he also seemed

to know almost every significant Muslim philosopher, from the Middle Ages to the present.

At the same time, with a Ph.D. from the University of Chicago, Nurcholish was deeply knowledgeable about most perspectives of modern social science. And his was not a rote learning. He reflected deeply on what he read and heard. It was always an intellectual treat to discuss issues with him and it was a continual learning experience.

Indeed, perhaps it is as a teacher that Nurcholish will be remembered best. Twenty years ago, long before it had become fashionable to worry about the “Clash of Civilizations,” Nurcholish was concerned that simplified and distorted interpretations of Islam could lead his fellow Muslims to positions of extremism and intolerance that did not represent what he believed to be the true teaching of his religion – indeed what he believed to be the foundation of all true religious belief. He believed that the best antidote to these negative interpretations of Islam was knowledge. Helping young Indonesian Muslims gain access to the full depth and complexity of thinking about their religion – both from the Koran and from later interpreters and philosophers – was the best way he felt that he could counter tendencies toward sectarianism and parochialism and even extremism. So he dedicated a significant part of his life to creating the Paramadina Foundation and the Paramadina University, in order that Indonesian Muslims could develop an understanding of their religion in all its depth and complexity.

While I remember Nurcholish for his spirituality, his love of learning and his love of teaching, I also remember him for his courage. He was a man of both physical and moral courage. As a leader of HMI during the turbulent years of the mid-1960's he stood bravely in the face of slogans such as "Crush HMI" and even "Crush Nurcholish." As a believer in democracy, he stood against not only the tyranny of Sukarno but also that of Suharto. And as an apostle of tolerance, he stood against the hateful attacks of extremists who claimed to speak for his own Muslim community. Perhaps it was his spirituality that enabled him to face all of these threats and attacks with such calmness and with that wonderful smile which constantly lit up his face.

I wish that he had not been taken away from this world so early. But it is said that those who have passed away still live among us, in the good deeds they have done and in the hearts of those who cherish their memories. By that standard, Nurcholish Majid will be among us for a very long time indeed.

Paul Wolfowitz

June 20, 2006

NURCHOLISH MADJID: AN INTELLECTUAL SUFI

By Ann Kull

What made a Swedish student interested in an Indonesian Muslim thinker that is (or rather was) completely unknown in that part of the world? My answer is that I have had a long period of personal interest in Southeast Asia. I wrote my exam for a Bachelor of Art in Islamology 1996 and the subject at that time was Indonesian Islam in general and Muslim representatives and their role in the building of independent Indonesia in particular. While searching for material I found a short notice about a journal called *Studia Islamika*. I started to subscribe and I also ordered all previous published numbers. Today I am probably the only proud owner of a complete collection of that journal in Sweden. Nurcholish's article *Islamic Roots of Modern Pluralism* is published in the first number and I immediately became interested in his liberal and tolerant but daring ideas. In 1997 I presented a proposal for doctoral studies on the ideas of Nurcholish Madjid, which was accepted and I started my studies late that same year.

I cannot say that I knew Nurcholish personally as we met only a few times. Yet, during my periods of fieldwork in Jakarta I spent many hours at Paramadina and although Nurcholish was seldom there his "spirit" was constantly present. I have also read most of his writings and followed his

activities for many years. Every normal workday at my office in Lund started with a quick review of the present number of Jakarta Post and KOMPAS on the Internet. Therefore, he has constituted a part of my everyday life for so long that he feels familiar to me anyway. For most people Nurcholish was a liberal Muslim reformer concerned with political and societal ideas. This is how he is described in scholarly works, in Indonesia as well as internationally, and this is also how he is presented and viewed by most Indonesians. However, in my dissertation, with the main headline *Piety and Politics*², I argue that Nurcholish was also a Sufi but not a Sufi in a traditional sense. His kind of Sufism was intellectual, individual and non-hierarchical. Therefore, my contribution to this volume is to discuss and analyse Nurcholish's spiritual side.

Nurcholish's view of spirituality and Sufism

During my interview with Nurcholish in 2002, I asked him how his ideas of the 1970s and 1980s—commonly regarded as extremely rational—harmonize with his current stress on spirituality and neo-Sufism. He looked somewhat tired, sighed and said:

Oh, many people criticise that. They say that we have changed, that we have become Sufis. When we – Usep [Fathudin], Utomo [Danajaya] and I – first presented our ideas in 1971 they sounded

² *Piety and Politics: Nurcholish Madjid and his interpretation of Islam in Modern Indonesia* (2005). Islamic terms are written in accordance with modern Indonesian spelling.

very rational. People were never interested in finding out what was underneath the rational ideas. They never asked who we were as private persons. But, we have been the same all the time. Just like Ibn Taymiyya. He is mostly seen as strongly against Sufism, because of Wahabism, and he is against popular Sufism, still he is a Sufi himself. (...) Sufism is piety, how to be religious without piety?³

If we examine Nurcholish's early works we do find out that these ideas were actually there. In 1968, in his article, *Modernisasi ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi*, Nurcholish noted that aside from the practical use of science, *takwa* and mystical experience are important parts of modernity.⁴ In support of this contention he presented a quote from Einstein: "The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the strength of all true science".⁵ In the mid 1980s Nurcholish wrote appreciative articles on the subject of *tasawuf* for the journal, *Pesantren*, as well as for a volume entitled *Tasawuf Sebagai Inti Keberagamaan* (1985).⁶

³ Personal interview with Nurcholish Madjid in Jakarta May 14th 2002.

⁴ Madjid 1994a (1987):175f

⁵ Madjid 1994a (1987):176. Nurcholish did not provide a reference to Einstein.

⁶ Howell 2001:711f

However, since the 1990s he has increasingly discussed a reformed kind of Sufism, which he called “neo-Sufism”.

Nurcholish said that human beings in a rapidly changing society need religion, perhaps more than ever before. However, in his view, they require not only the spiritual aspect of religion, but the humanistic values that are embedded within its teachings as well. He maintained that worship and devotion must be carried out in a sound way, without forcing human beings to obliterate their identities or divest themselves of freedom and dignity, which is sometimes the case with cults and fundamentalism. Human beings should engage in the exclusive worship of Allah and not another human being, which is itself a type of tyranny.⁷

Here Nurcholish’s discourse was not only directed against “cults and fundamentalisms”; it was also implicitly directed against the practices of many traditional *tarekats*. And as a prescription for the defeat of fundamentalism and tyranny he recommended the rediscovery of all dimensions of Islam and refereed to French convert Roger Garaudy’s seven guidelines for achieving this goal. Two of these guidelines, in particular, urge Muslims that in order to oppose the understanding of Islam as formal rituals and empty literalism, they must come to realize Islam’s spiritual dimension and the love of God, as developed by Ibn ‘Arabi and others.⁸

⁷ Madjid 1995b:134ff.

⁸ Madjid 1995b:156f.

Nurcholish also noted that *tasawuf* is one of the traditional scholarly disciplines of Islam, but that there has always been a struggle between *fiqh* and *tasawuf*—or rather between *syari'ah* and *tarekat*—concerning their respective validity for religious and societal development. However, from his point of view, they are complementary, and both are needed to achieve a full comprehension of Islamic religiosity.⁹

Elsewhere he said that one way to develop the spiritual dimension of Islam is to turn to Sufism—not the popular form that he called “old Sufism”, but the intellectual form that he called “new Sufism” or “neo-Sufism”. According to Nurcholish, the famous Indonesian *alim* Hamka advocated an esotericism restrained by *syari'ah* in his 1939 book, *Tasauf Modern*, which was influenced by al-Ghazali. In his view, this book is relevant to modern life, and thus Hamka has provided the foundation for a new Sufism in Indonesia.

Nurcholish noted that Hamka was extremely familiar with the thought of Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyah, and developed his own thought along the same lines.¹⁰ He also noted that Fazlur Rahman¹¹ had a deep knowledge of these two classical thinkers as well, viewing them as pioneers of “neo-Sufism”. According to Nurcholish, Rahman argued that

⁹ Madjid 2000 (1992):252-268

¹⁰ Madjid 1993:2f

¹¹ Fazlur Rahman was Nurcholish's supervisor when he wrote his Ph.D-thesis on Ibn Taymiyya's view on *kalam* and *falsafa* at the University of Chicago.

the “neo-Sufism” of Ibn Taymiyya is active, social-minded, closely linked to *syari’ah*, and encouraging of the intellectual attempt to uncover (*kasyf*) the truth of God. Nurcholish considered Ibn Taymiyya to have been a staunch critic of popular Sufism who, while employing all the Sufi terminology, strove to infuse it with puritan morals and *salafi* ethics.¹²

Nurcholish stated that Ibn Taymiyya widened the understanding of *zikir* to include all human actions aimed at bringing the individual closer to Allah, such as studying science (*ilmu*) and carrying out the principle of commanding the good and forbidding the wrong (*amar ma’ruf nahiyy munkar*).¹³ Nurcholish said that although Ibn Taymiyya was a follower of the strict Hanbali School of law, he was also a follower of the doctrine of Syeikh Abdul Qadir Jailani. He noted that there was nothing strange in this, as Jailani—the founder of Tarekat Qadiriyya—was himself a follower of the Hanbali School.¹⁴

Another source of inspiration for Nurcholish was the Egyptian Said Ramadan and his book *Social Spiritualism* (1965). Nurcholish said that Ramadan’s view on asceticism or *zuhud* is active, outward-oriented, and actively seeks understanding and knowledge through *ulama*, Qur’an and *sunnah*. Ramadan is also said to have stressed the importance of a balance between soul and body in humankind’s spiritual life (or “micro cosmos”), as well as the importance of

¹² Madjid 1993:3f

¹³ Madjid 1993:14. See also Madjid 1984:71f & 79f.

¹⁴ Madjid 2001:8ff & Madjid 1984:238f

preventing fanaticism in the worship of God.¹⁵ According to Nurcholish, “neo-Sufism” or “social spirituality” accords well with “genuine” Islam and can be of great benefit for Muslims today.¹⁶

Organised Sufism

In an article from 1974 called *Tasauf dan Pesantren* Nurcholish discussed the role of the *tarekat* teacher and his disciples:

What frequently occurs is that persons with extensive religious learning, who theoretically already understand how to carry out *zikir* and *ibadah*, still feel the need to attach themselves to a *tarekat kyai* and an expert in reciting the Qur'an whose level of learning is lower than their own. In this way they seem to obtain a way of freeing themselves from the burden of solitude (...) in carrying out their spiritual responsibilities, and surrender almost all responsibility to another person, namely the *kyai*.¹⁷

This anti-hierarchical statement represents a recurring view in Nurcholish's thinking. In addition, he stated that while Sufism has deviated considerably from the “*Sunnah*” throughout history, it cannot be held responsible for all

¹⁵ Madjid 1993:5f&8

¹⁶ Madjid 1993:9 &15

¹⁷ See Barton 1995:127. Translation by Barton.

deviations from “orthodoxy” within Islam. He remarked: “At times when Muslims have experienced deterioration in matters of political and military power, together with decline in intellectual activity, during the 12th and 13th centuries, it was the sufi movement that maintained the religious spirit in Muslim circles”.¹⁸ As Nurcholish was critical of the current societal situation in Indonesia and the rest of the Muslim world, it can be assumed that the conditions described in this quotation also prevail today.

In the early 1990s, Nurcholish elaborated his view of *tarekat*. He said: “*Tasawuf* in all its manifestations of different *tarekats*, is in principle a result of *ijtihâd* through humans effort to bring oneself closer to Allah. As a result of *ijtihâd*, some efforts to approach oneself to Allah are right and others are wrong”.¹⁹ He stated that the future of *tarekats* in Indonesia depends on both their flexibility and their capacity to handle the needs and problems of modern people. Nurcholish predicted that while the outer form of *tarekats* may change in the future, the essence of their spiritual teaching and doctrine certainly will not.²⁰ Nurcholish has never been a member of a *tarekat* and one reason for that was the traditional role of teacher and disciple respectively.²¹

¹⁸ Barton 1995:126f. The quotation is translated by Barton.

¹⁹ Madjid 1995c:98

²⁰ Madjid 1995c:100

²¹ Personal conversation with Budhy Munawar-Rachman in Jakarta May 17th 2002.

It is a common view in popular Sufism that Muslims may receive *syafa'at*, intercession or mediation, at the Day of Judgement. This is most often supposed to be granted by the Prophet Muhammad himself, although occasionally it is supposed to be granted by a saint (*wali*). Nurcholish's understanding of *syafa'at* is of importance to his view on Sufism in general and on *tarekats* in particular. He was strongly opposed to the idea of intercession between God and human beings, especially when it takes the form of worshipping at the tomb of a specific saint with the aim of persuading him to act as intercessor.²²

In this regard, Nurcholish noted that many Muslims interpret sura al-Baqarah/^{2:255}, "Who should intervene with Him, without his permission?",²³ as affording the possibility of intercession. He argued, however, that according to the interpretation of Wahhabis in Saudi Arabia and Muhammadiyah and Persis in Indonesia, no such possibility is extended; on the other hand, the Qur'an is said to contain numerous verses indicating that each individual is personally responsible for his or her own deeds and the merits that are derived there from.²⁴ Additionally, Nurcholish pointed out that since there is no clergy in Islam everyone has to take a personal and direct responsibility towards God.²⁵ This understanding is in keeping with Nurcholish's view that Islam

²² Munawar-Rachman 1998:54ff

²³ Munawar-Rachman 1998:55. English translation by Yusuf Ali.

²⁴ Munawar-Rahman 1998:56. See for example sura al-Najm/53:36-41.

²⁵ Madjid 1995a:96f

is an “achievement-oriented” religion: all persons must *endeavour* to create their own merits and are obliged by God to do so.

In my interview in 2002, I asked Nurcholish about his view on *tarekats*. He answered: “I know from my own area, Jombang, that some are good but some are bad. More like a way to collect wealth. But Sufism as a way of life, a concept of life, is good. To be a good religionist is to be a good Sufi”.²⁶ He continued by saying that there is an important connection between Sufism and piety: all the companions of the Prophet and all *Salafs* were Sufis; and pious opposition to the luxury in Baghdad is another example of Sufism.

Nurcholish also argued that Sufism could be carried out as a form of *ijtihad* in order to promote personal spirituality:²⁷ “The dzikir technique developed by tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah is a concrete example of *ijtihad* in the process of bringing oneself closer to Allah”.²⁸ He noted, however, that today Muslims are interested in Sufism as a way of receiving a deeper or more effective understanding of God, a way of shaping their mode of thought. Nurcholish also mentioned that he was particularly fascinated by the ideas of Frithjof Schuon, Martin Lings and René Guénon, modern men from

²⁶ Personal interview with Nurcholish Madjid in Jakarta May 14th 2002.

²⁷ Personal interview with Nurcholish Madjid in Jakarta May 14th 2002.

²⁸ Madjid 1994b:11

“the West” who have come to know Islam from that perspective, and thus have much to teach. He observed, however, that in urban Indonesia today there is a general need for some kind of Sufism or spirituality, and that this resembles the need in Europe and North America for the spirituality of the New Age.²⁹ In short, it appears that Nurcholish strongly disapproved of the idea of handing over to another one’s personal responsibility to God, be it in a traditional *tarekat*, an authoritarian cult, or a “fundamentalist” organisation. At the same time, he has a profound recognition of humanity’s spiritual needs—especially in these modern times—and the importance of their being fulfilled.

Political and economical advantages of personal spirituality

In a lecture 2001 Nurcholish also underlined the importance of rediscovering the treasure of early Indonesian works on *tasawuf*, such as the rich works on Sufism created by the Acehnese Hamzah Fansuri (d.1625), himself a member of the *tarekat* Qadiriyya and a Sufi poet. According to Nurcholish, the works of Fansuri could help Indonesians to revive the spirit of a truly Indonesian nation and interrupt the development towards an increasing focus on Java and the Javanese people.³⁰ This view must be seen as a criticism of the current state of affairs, and an argument in favour of a pluralistic

²⁹ Personal interview with Nurcholish Madjid in Jakarta May 14th 2002.

³⁰ Madjid 2001:1 & 4f

Indonesia in all spheres of society, including regional differences.

Nurcholish noted that many Muslims are already aware that *tasawuf* can provide a solution to the problems and needs of the modern era. There is, according to him, a classic treasure that awaits exploration and the European Sufis have already begun this pioneering intellectual and spiritual work.³¹ If this exploration continues on a large scale “it will lead to a true happiness in life, outer (*lahir*) and inner (*batin*)”.³² Hence, Nurcholish considered it a duty for modern Muslims to provide a transcendental aspect to modernity through the development of Muslim societies.³³

From the turn of the 21st century Nurcholish brought his view on spirituality into the field of business, discussing the basis for an Islamic business ethic. He elaborated Weber’s classical thesis on Protestant ethics, but noted that Weber’s conclusion—stating that *only* Protestantism, and especially Calvinism, is in line with modernity—is obviously wrong. In support of this perspective, Nurcholish cited the examples of Japan, Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, Bazaris in Iran, Santri merchants on Java and so on.³⁴ “This confirms that modern development like the one in Western Europe can be realized by other societies all around the world, based on the

³¹ Madjid 2001:21f

³² Madjid 2001:23

³³ Madjid 1999:xlvi-xlix. Foreword by Budhy Munawar-Rachman.

³⁴ Madjid 2002:23f

ethical views that prevail in their respective religion or culture”.³⁵

However, Nurcholish noted that, in terms of economic development, Indonesia had fallen behind its neighbours and must endeavour to catch up; here religious ethical values can be of great importance to business success. He made clear that in the field of worldly deeds this means that God obliges human beings to do whatever they do as well as possible. He delineated a chain of causal relationships, and explained that *takwa*—the awareness of God’s constant presence in all aspects of life—is the highest value that can be attained by human beings in their relation to God, and the result of worshipping God in a perfect manner. According to Nurcholish, the spiritual side of *takwa* will most certainly have a positive impact on economic behaviour as well as on one’s “everyday life”, not least with respect to the attainment of a state of inner comfort.³⁶ On this point, Nurcholish considered his Islamic model to be different from those that have been developed in Europe and North America.

In the opinion of Nurcholish, the values that are embodied in a “noble character”—thrift, justice and honesty—are said to have a positive impact on both leadership and business in general. However, he warned that while success in business is of value because it enables one to be independent and lead a good life, it should not lead to a life

³⁵ Madjid 2002:24f

³⁶ Madjid 2002:26-29

of luxury and excessive abundance. He also urged everyone in society to avoid conflict of different interests, emphasising, for example, that people in governmental offices should put aside their private interests and see to their duties as governmental employees first. For those who hold governmental, business, etc. positions in society, the awareness that God always watches them is of great help in the maintenance of justice and honesty.³⁷

Nurcholish was highly committed to this issue, not least on a personal level. During my periods of fieldwork and covering Indonesian news on the Internet, I have realized that many Indonesians are of the opinion that Nurcholish himself lived in accordance with these guidelines; this, in fact, was one of his most important strengths in public debate. His above comment about the responsibility of government employees and other state officials can be viewed as a direct critique of the prevailing situation in Indonesia's political, judicial and business institutions, which have been severely weakened by corruption and nepotism.

In sum, according to Nurcholish, one problem with Sufism and *tarekats*, as well as with movements that he defines as "cults" or "fundamentalist", is the hierarchical relationship between teacher/leader and student/follower. For Nurcholish, the power of the teacher or leader calls into question God's absolute monotheism. It is also incompatible

³⁷ Madjid 2002:29f

with the freedom to choose one's own way to God. He does not, however, deny the qualities of Sufi spirituality for the individual, or the historical importance of Sufism to Islam. He even considers it a duty for modern Muslims to spiritualise modernity. Moreover, he is also an untiring proponent of every Muslim's personal responsibility to carry out his or her duties in the best possible way and to create his or her own merits. The key to achievement of those merits, along with a happy life, is to reach an attitude of full belief in God, and by this believing attitude experience the constant presence of God in one's life. This is, according to Nurcholish, to live in a state of *takwa* that encourage people to pious conduct (*amal saleh*), which in turn leads to smooth interactions between humans and in the long run to a harmonious society.

The French sociologist Olivier Roy says that most liberal Muslim intellectuals are not widely read as their ideas are regarded as too intellectual. Although their ideas may be highly relevant for the reform of religious thought and development of society in general many people either do not understand what they write or as Roy puts it, "Liberal thinkers do not meet the demands of the religious market".³⁸ Many individuals search easy and concrete guidelines on how to carry out their religious duties or they are attracted to popular and charismatic preachers. Nurcholish, however, clearly stressed the importance of personal religiosity and spirituality

³⁸ Roy 2004:31

in favour of official religion. Yet, also his piety was intellectual and not the popular kind.

Concluding discussion

As I understood Nurcholish's vision it was not his intention to create a closed school of thought. He wanted to influence individuals with his approach to Islam and his ideas – through higher Islamic education at IAIN/UIN, at Paramadina, by reading his books or through his role as public intellectual – but he did not simply want them to follow his ideas. Rather he expected them to use his ideas and develop them further in their respective environments, and examples of this development are plentiful in the younger generations. I therefore hope that this is how his ideas will be further pursued in the future, and not by becoming rigidly institutionalised. However, some of his opponents regarded him as an “idol” and or icon already during his lifetime and I agree.³⁹

The societal climate in Indonesia has changed during the last year and the tone of the public debate has become tense and less tolerant. Without doubts the *fatwas* from MUI that outlawed forms of secularism, pluralism and Islamic liberalism provide a legitimating base for this development. Most likely it has strengthened and encouraged conservative or radical groups to more openly declare their standpoints and in cases threaten certain groups such as Ahmadiyah and JIL; as

³⁹ See for example the commentaries of Adian Husaini in Kull 2005:233.

well as to take stern action in the case of the pornography bill and the implementation of local bylaws of *syari'ah*. The very recently renewed discussion on the pluralistic character of Pancasila indicates that moderate forces realize the importance of turning to action against this development. Such a development is, in my opinion, something a pluralistic country like Indonesia cannot afford. Especially not if it aspires to continue the path towards democracy. Coincidentally this development covers the span of time since Nurcholish's decease but of course this is not solely because of the loss of Nurcholish's opinion in the debate. It is, however, obvious that his authority and voice of moderation and inter-religious tolerance, as well as his emphasize of everyone's personal responsibility, should have been heard for many more years. And of course, it shows that his ideas on social justice, ethics, individual spirituality, corruption, inter-religious tolerance and in favour of Indonesia's pluralism, are as relevant today as they were when they were originally presented.

Bibliography

Barton G. 1995. *The Emergence of Neo-Modernism; a Progressive, Liberal, Movement of Islamic Thought in Indonesia: A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahman Wahib and Abdurrahman Wahid 1968-1980*, (doctoral thesis). Monash University, Australia.

- Howell D.J. 2001. "Sufism and the Indonesian Islamic Revival", in *The Journal of Asian Studies* 60, No. 3. Association for Asian Studies.
- Kull A. 2005. *Piety and Politics: Nurcholish Madjid and his interpretation of Islam in Modern Indonesia*. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.
- Madjid N. 1984. *Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam*, (doctoral thesis). University of Chicago. UMI Dissertation Service, Ann Arbor, Michigan.
- Madjid N. 1993. "Sufisme Baru dan Sufisme Lama: Masalah Kontinuitas dan Berkembangan dalam Esoterisme Islam", in *Seri KKA ke-71*, Tahun VII. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 1994a (1987). *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Mizan, Bandung.
- Madjid N. 1994b. "Selayang Pandang tentang Tarekat di Indonesia dan Masa Depan", in *Seri KKA*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 1995a (1994). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 1995b. *Islam Agama Kemausiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Paramadina, Jakarta.

- Madjid N. 1995c. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 2000 (1992). *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 2001. "Khazanah Kesufian, Kekayaan Terpendam dalam Perbendaharaan Budaya Kemanusiaan: Dan Rintisan Aceh dalam Pertumbuhan Keindonesiaan", *Seri KKA*. Paramadina, Jakarta.
- Madjid N. 2002. *Fatsoen Nurcholish Madjid*. Republika, Jakarta.
- Munawar-Rachman B. 1998. *Pemikiran Keislaman Nurcholish Madjid: Sebagai Hasil dari Hermeneutika Neo-Modernisme* (doctoral thesis). Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
- Personal interview with Nurcholish Madjid in Jakarta May 14th 2002.
- Personal conversation with Budhy Munawar-Rachman in Jakarta May 17th 2002.
- Roy. O. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press, New York.

**FAITH AND KNOWLEDGE:
NURCHOLISH MADJID AS EDUCATOR AND PHILOSOPHER**

By MB Hooker and Virginia Hooker

*It is the Lord of Mercy who taught the Qur'an. He created man and taught him to communicate. (Qur'an 55:1-2.)*⁴⁰

The late Professor Dr Nurcholish Madjid (Cak Nur) was one of those rare human beings who practise their faith in all aspects of their lives, implementing their beliefs and principles at considerable personal cost. His legacy to those whose lives he touched and those who will continue to read his vast array of writings is thus rich and powerful. Those who had the good fortune to meet and talk with him or were in the audience when he presented one of his many public talks or lectures, at home or abroad, will have been touched by his warmth, compassion, broad-mindedness and persuasive argumentation. Whether through the written word or the spoken, Cak Nur had the gift of making almost instant contact with his audience and engaging them in his narrative.

He was in communication with his audience in the sense of the Arabic word '*bayan*' which appears in the Qur'anic quotation above (55: 1-2). *Bayan* conveys the sense of 'both

⁴⁰ M.A. S. Abdel Haleem, *The Qur'an: A New Translation*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

expressing oneself and understanding what has been expressed by others...'.⁴¹ Thus, Cak Nur was not only a superb communicator -- that in itself is most impressive -- but he exemplified also the more difficult aspect of communication. He paid attention to the words, concerns and rights of others, Muslims and non-Muslims, and tried to understand their intentions.

In this brief appreciation of Cak Nur's contribution to education and to Islamic philosophy we will focus on two concepts to which he referred often: faith and knowledge. Each is evident in two spheres of his life which were very important to him: his work as one of Indonesia's foremost academics and educators and his philosophical propositions about the relationship between sharia and state.

Education

In November 2000, despite a crushing workload and lengthy list of international speaking engagements, Cak Nur accepted an invitation to speak at a conference in Canberra.⁴² The visit would also encompass a meeting with Australian business people, journalists and bureaucrats, and a signing ceremony with his counterpart at The Australian National University, to seal a Memorandum of Understanding with University ParamadinaMulya. Cak Nur's conference talk was extempore, without notes, wide-ranging and on the theme of

⁴¹ Haleem 2004:353, note *b*.

⁴² Entitled 'Islamic perspectives on the new millennium', coordinated by Amin Saikal and Virginia Hooker, November 2000.

the common humanity of all mankind. It was very well received and we return to it below.

It was Cak Nur's meeting with the non-academic audience, however, which had an even warmer outcome. Held in an exclusive and somewhat formal venue, it was attended by Australians who had little knowledge of Indonesia other than a realisation that it was in a transition period following the ending of the New Order government and that it had been hit hard by the Asian economic crisis. They believed Indonesia needed help but were somewhat doubtful about how this could be achieved in a context of endemic corruption and inter-ethnic and inter-religious violence.

Cak Nur understood his audience immediately and evaluated the most effective way of communicating with them. In his fluent English (a surprise to his audience) and with a charm, urbanity and wit they found hard to resist, he gently explained that Indonesia was in a bad way. He went on to describe that despite the almost overwhelming obstacles, Indonesia rested on a bedrock of individuals who were good, sincere and dedicated to improving conditions for their fellows. Theirs was a simple and practical morality devoted to change towards an improved life for the suffering poor, beginning at grassroots levels. This, he pointed out to his audience, was not considered newsworthy and was rarely if ever reported by the world media.

Cak Nur did not lecture his elite audience but his message was clear: recognise this wellspring of morality and

good intention that operates in Indonesia and assist it to grow. Business opportunities do exist in Indonesia, he assured his audience, but doing business in Indonesia was an opportunity to act with morality and good intentions- - to show best practice by example. Few of the audience present at that meeting will forget Cak Nur or his message and his quiet charm, reasoned arguments and appeal to their sense of morality left its mark. He had educated his audience and impressed them with his faith in humanity.

The academic audience at 'Islamic perspectives on the new millennium' conference was interested in understanding contemporary expressions of Islam in Indonesia, particularly in the context of improving interfaith relations, in Australia as well as in Indonesia. Because Cak Nur's talk was delivered in his favourite mode – without notes – and because he had no time to write these up later for publication, he agreed to a suggestion⁴³ that material on the same themes already published in Indonesian be abbreviated and translated into English as a book chapter. Thus 'Indonesian Muslims Enter a New Age' based on the introduction to *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* [Islam Doctrine and Civilisation: A Critical Examination of Belief, Humanitarianism and Modernity, (Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta 1992)],

⁴³ The suggestion was from Dr Yudi Latif, to whom we were most grateful.

was published in 2004.⁴⁴ The chapter captures several themes which were of ongoing importance to Cak Nur and the following extracts express them in his own words:

- 'The Holy Book teaches that all the faithful are brothers....This series of divine commandments about brotherhood is followed by an affirmation of the principle that all mankind are brothers and that the division of mankind into different races and ethnic groups was meant to provide markers of self identification (identity), which must be borne in a broader humanitarian environment with an attitude of absolute mutual respect. It is also stressed that a person's dignity and worth cannot be measured by external factors such as nationality or language, for dignity and worth consist in a truer philosophy of life, subsisting in man's deepest self, namely piety – and only Allah knows and can measure piety (Q. 49:10-13). Thus God alone has the right to measure and determine someone's worth, whereas a man must appraise other men in the spirit of equality.' (Madjid 2004: 74-5).
- 'If it is true that man is essentially good because of his God-given nature, and if it is true that this God-given nature is the basis of his natural disposition and to seek and side with what is right and good

⁴⁴ See *Islamic Perspectives on the New Millennium*, pp.74-90, edited by Virginia Hooker and Amin Saikal, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2004.

(*hanif*), our view of our fellow man cannot be otherwise, and in principle must be entirely optimistic and positive.’ (Madjid 2004: 77).

- ‘...Faith alone is indeed enough to make people oriented towards virtue, and to have “good intentions”. Faith, however, does not provide them with the ability to implement their intentions. So it is no guarantee of success. Conversely, knowledge alone may enable people to do something tangible. However, without the guidance of faith their knowledge will bring them greater misfortune than those who lack knowledge’. (Madjid 2004: 81).
- ‘...it is not sufficient merely to work as well as possible and to achieve success by considering and following God’s laws through the use of knowledge to obtain His blessings as *al-Rahman*. ... We must constantly bring ourselves closer (*taqarrub*) to Allah and absorb as deeply as possible individual religious values like reciting prayers, surrender to God, patience, sincerity, obedience, and by real trust in Allah while making the greatest social commitment. Thus our success will be neither purely for our own pleasure nor solely for the present, but also for the welfare of society at large and in preparation for the future’. (Madjid 2004: 85).

These four points: brotherhood and equality of all mankind; the essential goodness of mankind; faith and knowledge as inseparable partners for success in this life and the next; and the use of knowledge for the betterment of all society are principles which Cak Nur applied to a project very close to his heart, the development of Paramadina University. After initial contact from Utomo Dananjaya and Yudi Latif, The Australian National University agreed to open negotiations with Cak Nur as Rektor to develop the basis for a memorandum of Understanding and ongoing cooperation between two universities who each strove to develop the best in their students and staff and to apply knowledge to the problems of modern life. On 21 November 2000, the Memorandum was signed by Cak Nur as Rektor of Paramadina University and Professor Deane Terrell, then Vice-Chancellor of The Australian National University.

Issues of funding, the loss of Cak Nur, the immediate demands of other academic responsibilities, the focus on short-term goals have perhaps clouded the vision initially envisaged by the signatories to the Memorandum and the promise of academic and intellectual cooperation has not been as actively applied as it might have been. Perhaps this is the time to again take up Cak Nur's call for faith and knowledge to lead us to a better future and to engage more vigorously in on-going cooperation between these two institutions who still each strive for noble purposes.

Islamic Philosophy

Nurcholish Madjid made a considerable contribution to the theory of sharia and state in modern Indonesia. It is a contribution drawn from the realities of sharia in Indonesia. It rests on one proposition: historical Islam is primary, not as a source of prescription but as a demonstration that faith and knowledge are not the same, though they are related. There is a necessary nexus connecting them. The nexus is found in the idea of context, contextualisation. Cak Nur explains this as follows. The Qur'an is absolute and inviolate, and the Sunna is an exemplification of the absoluteness of revelation. Revelation does not regulate every last detail of life, hence the scholarly jurisprudence in the *fiqh* texts. The idiom of revelation is in the 7th century Arabic language and culture. One must, therefore, isolate those principles in Qur'an which directly state social justice prescriptions, specify their 7th century idiom and then specify the contemporary context in which these principles are to be applied.

There are, of course, obvious similarities between Cak Nur's views and those of Hazairin and earlier scholars, in particular the historical reference (see also below), but at the same time quite substantial differences. Thus, Cak Nur argues that while the Qur'an is absolute, the Sunna may have a lesser normative value in identifying prescription and this opens the way for Indonesian circumstances to become relevant. However, the consequences of these, in formulating a system of prescription (*ahkam*) are not unrestrained. Any set of prescriptions identified on a contextual basis must be read

with revelation. Thus is a pure Natural law position, human authority is limited. Just as important, how is “context” to be established: is it in philosophy, in the sociology of Indonesian Muslim society, in politics, and is the test to be efficacy? These and other questions remain debatable in today’s Indonesia.

Returning briefly to history, to 7th century Arab idiom, there is the huge assumption that one can identify an idiom of 1400 years ago with reasonable certainty. This assumes an objectivity for history, a subject bristling with difficulties in historiography. From the point of view of the discipline of history, criteria for identifying context and whether these can ever be found in “pure” law form is highly debatable. But should one ever search for purity? Is not some criterion, even a flawed one, better than nothing? The answer to that depends on (a) the purpose of the inquiry. In our case here, Cak Nur is not searching for objectivity as such but for a meaning for “social justice,” which can be used in the contemporary world. (b) Second, the nature of the material; ultimately it derives from revelation. Again, for modern historiography, God (revelation) cannot be a historical cause. But that misses the point for Islam where God, is the cause and the methods developed by Muslim scholars over 1400 years as to what cause is and how it is to be worked out are sufficient for that purpose. In short, the argument has shifted from canons of historiography, to canons of legitimacy, to a revealed system of duties (which are “to God”).

This is a considerable shift and to justify it Cak Nur proposed the following. First, a-historicism is a fatal flaw in the

argument. Second, he rejected the modern Western position that revelation cannot be a cause in historical explanation. It denies the Qur'an and, especially, the Sunna on which sharia ultimately depends. It follows, therefore, that while tradition and dogma are not the same, they can be discussed together, without violence to either, through the idea of *sense of history*. We should be careful here to say that a sense of history in this very general use does not necessarily mean historicism. It should not be used to mean that there is an inevitable process governed by its own law and, thus, immune to the intervention of human choice. On the other hand, it should also be pointed out that some extreme Muslim apologists do mean this in Indonesia and elsewhere. Having made claim what sense of history *is not*, we can now see better what it has come to mean in the thought of Cak Nur.

(i) Historical explanation: to understand and interpret the past is also to understand the present. This is the essence of historical explanation because it is always done for motive or purpose. Perhaps the essential core is the question – why do we try to provide an explanation, or more than one, for past events which are known to have happened in place and time? The answer is that explanation in this sense is crucial for sharia, that is, “sharia” as an historical artefact – because it has immediate practical consequences now, in the contemporary Muslim world. There is a huge mass of material. The problem is to restrain motive and clarify intention, so as to do no violence to history, but at the same time to advance a case or demonstrate practical consequence. Cak Nur's first

question is why do people put forward the idea of the Islamic state, what is the purpose of the proposition?

His answer in two parts. First, his historical explanation is that the Islamic State idea is essentially an apologia, and a reaction to Western ideas of state which have proved successful. He notes versions which have failed (fascism, communism) but his position is that the European State is as successful as the System (though he did not use that term). The secular, pluralists, democratic (whatever the adjective) state did deliver social and economic benefits in the absence of religion. In contrast, Muslim states or those who called themselves “Islamic” had failed to deliver. The response, as apology, was to call for “Islamic”, a system which can (a) catch up, (b) restore pride and (c) preserve culture. These are still contemporary arguments but Cak Nur’s observation is quite simple; a recourse to an Islam which is apologetic or desperate just does not work, it does not deliver. What, then, is the answer for the *umma*? It is, in his own words, a proper sense of pride in Islam and, following from this, an openness to knowledge. Even in non-religious sources, openness is the key because it is both within the tradition of Muslim thought and can be demonstrated as viable from modern history.

Cak Nur’s explanation of modern history (that is, immediate post-war) of Islam is inferiority which is not necessary and also inhibits both the ability to innovate and create. He further elaborates, with specific reference to the Islamic state idea, that “*fiqh*-ism”, that is, the undue emphasis on past scholarship, distorts any possibility of understanding

the notions of Islam and state. Historically, he is prepared to admit that *fiqh* was fundamental to pre-modern Muslim politics but that this is no longer the case. Moreover, to equate *fiqh* with sharia, and he accuses the modernists of doing this, unnecessarily restricts the meaning of sharia by confining it to a very narrow sphere. *Fiqh* itself must be reformed for modern conditions.

In short, Indonesian Islam must be accepted for what it is and in the forms in which it manifests itself. The proviso is, of course, that deviation in dogma is not permitted. “Indigenization” of Islam is an historically known process and must be accepted as such.

(ii) Philosophy of History: some years ago MB Hooker described a preliminary outline of Cak Nur’s philosophy of history for Indonesian Islam.⁴⁵ It seemed then, and still does now, that Cak Nur provided a coherent method founded in philosophy of history. The argument then put forward needs further explanation, not least because the language which Cak Nur uses is readily understood by a non-Muslim (secular) audience. He has truly crossed an important boundary in making possible a mutual comprehension. He was, of course, perfectly aware that he was attempting such an exercise, his language and references show this. He never fell into the trap of simulation – reliving the past as though he were there – a

⁴⁵ M.B Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*, Allen & Unwin and University of Hawaii Press, Sydney/Honolulu, 2003, pp.38ff.

feature of the “sharia as sufficient” school. The past may be in the present but it cannot be recreated as such. To suppose it can is to deny history itself and Cak Nur comes down strongly in favour of what he calls “readiness for change in a positive and constructive way” citing both classical sources and contemporary Western scholarship. Definitions for the past have no mechanical application just because they exist and this includes *fiqh* and *ijtihad*. Past thought has to be judged objectively. This is his philosophy of history which has to be read with emphasis on the difficulties which his views raise. It is not criticism for criticism’s sake; instead it is an acknowledgement of the complexity and sophistication of his thinking.

Revelation is prior: this means the Qur’an. This position is obvious from within Islam and has to be accepted as the foundation premise by non-Muslims, including Western scholarship. Whether or not the latter believe in God is beside the point. This premise, as a matter of historical and contemporary fact is the position from which all discussion then flows.

The Sunna, however, though divinely inspired, may have normative value independent of direct revelation particularly so far as prescription is concerned. This is a much more difficult position to defend. A strict Sunni response is to reject the idea. However, there is historical evidence from within. Muslim scholarship to show a range of debate concerned with establishing method to validate actual prescription. For Cak Nur the debate is not merely historical,

it is a contemporary debate because the question - how do we locate the binding force of prescription? – is the crucial question. The answer or answers to that question will be directly influenced by the purpose for which the question is asked. His own general purpose is to arrive at a “social justice” (below).

The status of *Fiqh* texts: for Cak Nur they have no necessary prior status. They are written by men and, therefore, in the context of time and place. The criterion on which they must be judged is suitability or usefulness. By definition, the criterion allows for variation and this is their characteristic (for example, the schools of law). In short they carry no necessary authority. The argument is attractive and can also be shown to be historically sustainable. For example, the *Kompilasi Hukum Islam* is, in fact a selective re-writing of some *fiqh* texts for a limited purpose, thus demonstrating that the criterion of use for a time and place passes the test of efficacy.

However, the argument tends to disguise or obscure a more fundamental point which Cak Nur really addressed only indirectly. This is the issue of authority to state prescription in the Indonesian context. A substantial majority of ‘*ulama*’ hold that the texts (*kitab kuning*) are authority and justify this on historical grounds, that is, that 1400 years of text and commentary, written under strict discipline, have provided a distillation of the Divine imperative for practical purposes. “Modernists” of course reject this version. However, there is

no mechanism for resolving the different positions. Cak Nur's answers are the following:

- Prescription and Morality: Cak Nur holds that these cannot be separated and indeed must be a whole for purposes of social justice. This is a pure natural law position, within the constraints imposed by revelation. The issue for both sharia in its widest sense and classic Western forms is the nature of "constraint". How and by whom is it identified, that is, what is the nature of human authority (reason) in God's design for humanity? Cak Nur's answer is that prescription is only knowable by reference to its context and is, therefore, always relative. Divine will is knowable though (God-given) reason and is absolute. However, specifying the true principles necessary for correct reasoning is another matter. The purpose of social justice is, thus, not a sufficient answer although as a motive it is most appealing. A related issue is the proper identification of prescription. For Cak Nur this is again a matter of context – respectively the Arab idiom and contemporary imperatives. As to the former it is not, by virtue of that idiom alone, decisive. The alternative is to use a "more evolved" *ijtihad*. What this means and how it is to work is yet to be fully explained and remains one of Cak Nur's major challenges to contemporary scholarship.

- “Context” – This is a key idea in Cak Nur’s philosophical thinking but it seems to be used in a number of different senses. At the risk of over simplifying, contemporary Muslim culture in Indonesia is one reference. The political manifestations of Islam are another. There is also a variety of philosophies from the Middle East (from Abduh to the present including Syed Qutb, Hasan al-Banna and Yusuf al-Qaradawi) which provide other versions. This again is one of Cak Nur’s legacies which modern scholars have to work through.

Cak Nur’s philosophy of history and context are a real advance in philosophy for sharia. He has provided a multi-layered foundation, which is internally consistent, and on which a new *mazhab* might be constructed. His proposed relativity of *fiqh* has already been successfully demonstrated as practical (the *Kompilasi Hukum Islam* is a good example of the “localisation” of *fiqh*). When linked with his concept of social justice, in which faith and knowledge are combined, the morality of Islam may yet result in a distinctive sharia method for Indonesia.

CAK NUR, MUSLIM “PUBLIC INTELLECTUAL” FOR THE 21ST CENTURY

By Abdullahi Ahmed An-Na`im

I had the honor and privilege of meeting Professor Nurcholish Madjid (affectionately known as Cak Nur) only a few times, but have been a student of his life and work for many years. Since to me Cak Nur is the model for the Muslim ‘public intellectual’ for our present era and future, I begin this tribute with a brief explanation of this role in general. As clarified by the late Edward Said in his 1993 Reith Lecture, the mission of the intellectual is to advance human freedom and knowledge. This mission often means standing outside of society and its institutions and actively disturbing the status quo, yet the public intellectual must always be part of society for his or her work to constantly be relevant and useful for society in its broader context. While usually educated in a particular discipline or field of knowledge, the public intellectual should transcend the limitations of that specialization, even when communicating its insights and benefits to the wider public, to clarify how that field relates to broader social, cultural, and political concerns. The highest model of the public intellectual becomes a symbol for far more than his or her discipline or field of knowledge, like Einstein who became a symbol of gentle rationality and human nobility, and so is Cak Nur.

The Legacy of Professor Madjid¹

Nurcholish Madjid (1939-2005) began his public intellectual career in the late 1960s as one of the most influential leaders of Himpunan Mahasiswa Islam (Islamic Student Association), a large and dynamic student organization in Indonesia. In that organization he was most successful not only in motivating his fellow young activists, but also in initiating a vigorous intellectual movement for the long term. He formulated and developed the ideological framework of the organization in which he maintained the principles of Islamic belief (*iman*), humanity, the concept of free will and human universal responsibility, as well as the relationship among humanity, science and technology.

In the 1970s, Cak Nur launched an important intellectual movement called “Gerakan Pembaruan Pemikiran Keagamaan” (Reform Movement on Religious Thoughts). The significance of that movement lies in its effort to reformulate fundamental Islamic doctrines regarding matters of divinity, humanity, and worldly lives in the particular context and political realities of Indonesia. Far from an extremist ideologue obsessed with theoretical intellectual purity, he was a pragmatic leader who sought to influence social change in real and sustainable ways. As a Muslim public intellectual and realistic leader, he was concerned with clarifying a conception of Islam that is negotiated with the modernization process that was taking place at that time. For instance, he and his followers supported the development programs of the Orde

Baru (New Order) regime, challenging the government of Soeharto to honor its own declared priorities and political objectives.²

Cak Nur emerged from the Muhammadiyah Islamic reform tradition of Indonesia but took that tradition forward in realizing its rationale and objectives because his own movement was better prepared to accept the most progressive ideas of earlier modernist reformers, while at the same time taking the views of traditionalist reformers into consideration. The combination of his reform movement and that of Abdurrahman Wahid sought to bridge the gap between the two main Indonesian traditions of Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama (NU), combining elements of both of them that are most conducive for the best interests of the country and all its peoples.³ Like earlier movement, this reform approach emphasized *ijtihad*, but understood that to mean re-consideration of classical resources through modern analytical methods.

Cak Nur played a significant role in promoting an approach to interpreting the Qur'an by applying reason as well as placing the text in the historical and cultural contexts of modern lives. In order to disseminate his thoughts among broader publics, Nurcholish Madjid founded the Paramadina Foundation in Jakarta. This foundation aimed at providing business men, professionals, civil servants, and university students with a progressive outlook of Islam that can play a role in social lives. Creatively and constructively designed, this

foundation gives positive support to social development and avoids defensive and reactive attitudes. The University of Paramadina was founded under this foundation, and Professor Madjid served as the rector.

Throughout his works, Cak Nur emphasized that Islam properly understood can help Muslims appropriately respond to such issues as nationalism, modernism, secularization, capitalism and social justice. In the 1970s he began developing some concepts and distinctions in attempting to clarify his mission. For instance, by the phrase “yes to Islam, no to Islamic political party” he sought to disassociate the sincere and consistent adherence of Muslims to the precepts of Islam from their political positions or ambitions.

In other words, he opposed the use of Islam as a political ideology, while encouraging Muslims to live by the cultural values of Islam. He also emphasized the need to revitalize the egalitarianism of Islam in the social lives of Muslims. To clarify this principle, he used a socio-historical and cultural approach and analysis, instead of in purely normative or textual terms, though he did cite the Qur’an and Sunna (Hadith) to support his argument. He believed that Islamic civilization was developed by Muslims who were profoundly influenced by the spiritual and humane values of Islam, but lived in a pluralistic human environment and struggled for the growth and development of their societies in their broader context and time.

In his view, which I share, plurality or diversity in the human condition everywhere and throughout history is in accordance with the Will of God (the Qur'an: 49:13). It therefore follows in his thinking that Indonesian Muslims should respect the plural nature of the country in pursuing their social and political objectives in accordance with an agreed common platform that can be shared by different groups of society. He defined this common platform or meeting point in Qur'anic terms as *kalimatun sawa' bainana wa bainakum* (the Qur'an: 3:64). He also held that Pancasila may be considered as Indonesian common platform in the context of Indonesia. Cak Nur also cited historical support for this view, like the Charter of Medina which the Prophet agreed with Christian and Jewish communities, or the experience of Muslims in Spain. While presenting those experiences to inspire Indonesian Muslims, he also noted the limitations of historical context in the past that did not permit the full scale of the ideals of pluralism.

The relationship among Islam, state and politics was one of the primary concerns of Cak Nur. The first project of his reformist thought in the early 1970s was about secularization, which he defined as "differentiating between the *dunyawi* [of this world] and the *ukhrawi* [of the next life], between the profane/secular and the sacred." He presented that position in the context of rejecting the argument that Muslims should struggle for Islam through establishing an Islamic political party--the argument of those who sought to revive the MASYUMI, which was a highly influential Islamic party in the

1950s. Already at that early time in his career, Cak Nur declared that Indonesian Muslim political leaders, notably Masyumi leaders, had become conservative and even dogmatic.⁴

But he also distinguished between secularization, which he accepted, and secularism which he rejected as the total separation between religion and state because he argued that religion should be beneficial for state). At the same time, Cak Nur did not recommend a total fusion between Islam and the state, as is clear from his support of Pancasila as the state 'ideology'. Instead, he proposed the idea of *masyarakat madani*, as an Islamic concept of civil society that signify partnership between Islam and the state.

To him an "Islamic state" is not only unnecessary, but also undemocratic and dangerous as that view fails to differentiate between the secular and the sacred, while an ideology like Pancasila is already Islamic because it serves as *kalimah sawa* (meeting point) for all Indonesians in their intense and complex pluralistic setting. In the partnership and mutual interaction he proposed between religion and state religion should be in the domain of civil society (*masyarakat madani*). This idea has been remarkably influential among Indonesians who clearly prefer to see civil society as a partner of the state, rather than its enemy. As a student of Cak Nur, I will now conclude this brief tribute with some reflections about carrying his legacy forward for Indonesia and the global Muslim Umma everywhere, as well as peaceful and

cooperation international relations among Muslims and non-Muslims throughout the world.

Taking the Legacy Forward

One of the main insights I gained from studying the life and works of Cak Nur is that Muslims do not have to choose between Islam and modernity, or between their religious convictions and life-style and the needs of political stability and economic and social development at home and peaceful international relations abroad. On the contrary, Islam in fact provides Muslims with all the intellectual and social as well as spiritual resources they need to respond to those needs in the most holistic and effective manner.

I also find Cak Nur to be a true Muslim public intellectual for the present and future of Islamic societies because he combined superb clarity of ideas with a pragmatic approach to initiating and promoting social movements to carry those ideas into practice. Good ideas alone are not enough, but social movements are not useful either without a clear sense of direction and sound ways of setting priorities and objectives, that is, a combination of where to go and how to get there. It is also clear to me not only that the issues Cak Nur addressed in the Indonesian context urgently face all Muslim societies, but also that the solutions he proposed are most useful throughout the Muslim world as well.

Unfortunately, there are many barriers and obstacles facing dialogue among Muslim societies, including problems of poverty, lack of education, weak technical infra-structures of communication and travel. Most Muslims from different parts of the world are not even able to communicate with others except through one of the colonial languages, especially English at present. But we have only ourselves to blame for the continuation of these problems, and cannot continue to blame others for our problems or seek futile excuses. It is true that some of these difficulties have been created by European colonialism and post-colonial hegemony, but we can only blame ourselves for the internal weakness that made colonialism possible in the first place. In fact, the core problem is that our minds continue to be colonized by European political thought and institutions. That is why the life and work of Cak Nur are so critically important, yet it will be difficult to render these valuable resources in the service of Muslims everywhere.

In light of these problems, it may be best to actually present Indonesia as a model of other Islamic societies to follow, rather than attempt to introduce the ideas of Cak Nur in those situations. Since it takes both good ideas and a social movement to carry them into practice, this combination is already present in Indonesia more than the vast majority of Islamic countries. It is in Indonesia that he grew up and was formed, developed his ideas and social movements, and it is only appropriate that it should also be in Indonesia that his mission is first realized. My modest contribution to this

process is the book I am writing about the Future of Shari`a, which benefits a lot from the pioneering work of Cak Nur. The translation of this book in Bahasa Indonesia and another six languages of Islamic societies can already be seen at the website (www.law.emory.edu/fs). But the first actual publication of the book will be in Indonesia, a tribute to my *Ustadh*, Cak Nur.

Death is the way of life (*al-mawt sunnat al-hayah*), but the question for all human beings is what have we done with our life, and what legacy we leave behind? On that count, Cak Nur has lived a supreme life and left behind an enduring legacy for Indonesia, the global Muslim Umma, and the totality of humanity. The challenge for the rest of us now is to honor his blessed memory by upholding the superior Islamic values he lived by and carry his mission forward, to the best of our ability.

¹ This brief review is mainly based on Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX* (the Theology of Reform: the Shift of Islamic Sunni Discourse in 20th Century Indonesia), (Jakarta: Serambi, 2004), pp. 317-367.

² Muhammad Kamal Hasan, *Muslim Intellectual Responses to "New Orde Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia), 1982.

³ Greg Barton, "Indonesia's Nurcholish madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual 'Ulama: The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in neo-Modernist Thought", *Studia Islamika*, Vol 4, No 1, 1977, pp. 29-81.

⁴ Nurcholish Madjid, "The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a Participant's Point of View", in Gloria Davis (ed.), *What is Modern Indonesian Culture?* Ohio: Center for International Studies, Ohio University, 1979.



Almaghfurlah
Kyai H. Prof. Dr. NURCHOLISH MADJID
(17 Maret 1939 - 29 Agustus 2005 M)



Nurcholish Madjid
S o c i e t y

Cak Nur

Nurcholish
Madjid

